



**ANALISIS PENGARUH PDRB, UMK, ANGKATAN KERJA DAN
PENDIDIKAN TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh
Yulita Dwi Angraini
NIM 130810101169

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENGARUH PDRB, UMK, ANGKATAN KERJA DAN
PENDIDIKAN TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Yulita Dwi Anggraini
NIM 130810101169

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

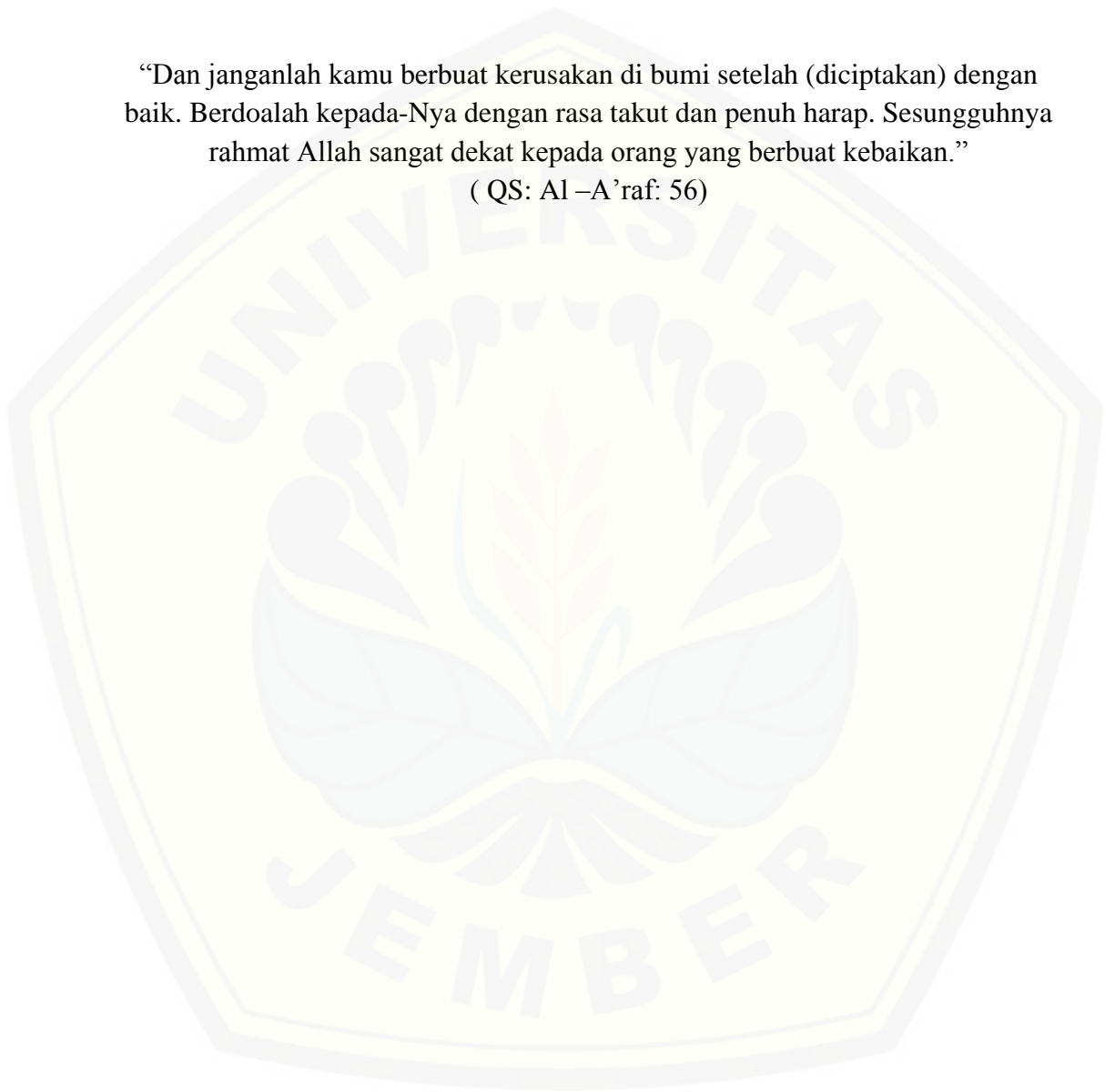
Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur yang sebesar - besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Ibunda Sulasiah dan Ayahanda Abu Sadik tercinta yang senantiasa menyebut namaku disetiap do'anya, memberikan dorongan moral, spiritual, materi, kasih sayang, semangat, pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Kakakku Anggun Ayu Lestari yang telah memberikan semangat, do'a, kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
3. Guru-guru sekolahku dari Taman Kanak – Kanak hingga Perguruan Tinggi, yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
4. Almamater Universitas Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta jurusan Ekonomi Pembangunan yang saya banggakan.

MOTTO

"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah."
(Abu Bakar Sibli)

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”
(QS: Al –A’raf: 56)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulita Dwi Angraini

NIM : 130810101169

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2018
Yang menyatakan,

Yulita Dwi Angraini
NIM 130810101169

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PDRB, UMK, ANGKATAN KERJA DAN
PENDIDIKAN TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh :
Yulita Dwi Angraini
NIM 130810101169

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Drs.Sunlip Wibisono, M.Kes

Dosen Pembimbing Anggota : Dr.Riniati, MP

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur

Nama Mahasiswa : Yulita Dwi Anggraini

NIM : 130810101169

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 16 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.Sunlip Wibisono, M.Kes.
NIP 195812061986031003

Dr. Riniati, MP
NIP 196004301986032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.
NIP 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS PENGARUH PDRB, UMK, ANGKATAN KERJA DAN
PENDIDIKAN TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yulita Dwi Anggraini

NIM : 130810101169

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

16 Juli 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P (.....)
NIP. 195504251985031001
2. Sekretaris : Dr. Zainuri, M.Si. (.....)
NIP. 196403251989021001
3. Anggota : Dra. Anifatul Hanim, M.Si. (.....)
NIP. 196507301991032001

Foto

4x6

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap
Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur

Yulita Dwi Anggraini

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* yaitu PDRB, UMK, Angkatan Kerja dan Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan *explanatory research*. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari dinas terkait seperti BPS dan BAPEDDA yang berupa data *time series* (tahun 2011-2015) dan cross section (38kabupaten/kota) dengan objek penelitian pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Data Panel. Uji hipotesis menggunakan pengujian parsial (uji t), simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Uji asumsi menggunakan uji multikolinieritas, heterokedastisitas, dan normalitas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa PDRB, UMK, Angkatan Kerja dan Pendidikan berpengaruh secara bersama sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Pada tahun 2011 – 2015 dengan tingkat kepercayaan 0,65% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara individu hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK dan Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, sedangkan PDRB dan Pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur.

Kata Kunci: TPT, PDRB, UMK, Angkatan Kerja dan Pendidikan

Analysis Influence of GDP, Wage, Labor Force and Education on Open Unemployment in East Java Province

Yulita Dwi Anggraini

Department of Economics and Development Study, the Faculty of Economics and Bussines, the University of Jember

ABSTRAK

This study aims to determine how much influence of GDP, Wage, Labor Force and Education to Open Unemployment Rate in East Java. This research uses explanatory research. The data used in this study are BPS and BAPEDDA in the form of time series data (2011-2015) and cross section (38 districts / municipalities) with the object of research on Open Unemployment Rate in East Java. The data analysis method used in this research is panel data regression analysis. Hypothesis test using partial test (t test), simultaneous (F test), and coefficient of determination (R²). Assumption test using multicollinearity, heterokedasticity, and normality test. The results of this test indicate that GDP, Labor Force and Education affect Unemployment Rate Open in East Java In 2011 – 2015 with the level of confidence the remaining 0.65% influenced by other factors. Individually, the result of the research shows that Wage and Labor Force has a significant effect on Open Unemployment Rate, while GDP and Education have no significant effect on Open Unemployment Rate in East Java.

Keywords: TPT, GDP, Wage, Labor Force, and Education.

RINGKASAN

Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur; Yulita Dwi Anggraini; 2018; 89 halaman ; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Angkatan Kerja dan Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* terhadap PDRB, UMK, Angkatan Kerja dan Pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan *explanatory research*. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari dinas terkait seperti BPS dan BAPEDDA yang berupa data *time series* (tahun 2011-2015) dan *cross section* (38 kabupaten/kota) dengan objek penelitian pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Data Panel dengan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa: 1) PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Artinya jika nilai dari PDRB tidak akan memengaruhi nilai dari tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. 2) UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Artinya jika UMK naik maka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur akan turun. 3) Angkatan Kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Artinya jika Angkatan Kerja naik maka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur akan turun. 3) Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Artinya semakin tinggi pendidikan tidak akan memengaruhi nilai dari tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Angkatan Kerja dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi ilmu Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas jember.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
3. Bapak Drs.Sunlip Wibisono, M.Kes selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr.Riniati, MP selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, pengarahan serta motivasi dengan penuh kesabaran dan keihlasan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas jember;
6. Ibunda Sulasiah dan Ayahanda Abu Sadik, terima kasih yang tak terhingga atas do’a, semangat, kasih sayang, motivasi, kerja keras serta pengorbanan selama ini;
7. Kakakku Anggun Ayu Lestari, terima kasih atas pengorbanan, do’a dan kasih sayang serta dukungan tanpa henti;
8. Keluarga besar MAHAPENA yang telah memberikan pelajaran serta pengalaman hidup untuk menjadi manusia tangguh. Spesial untuk angkatan M.38 yaitu Siti Soimah, Karlina Kusumasari, Livia Ayu P.D, Prista Silvina,

Hilda K.S, Ahmad Holil, Muhammad Hamdani L, Muhammad Taufik, Abid Qudsi F, Misbah Yang mengajarkanku arti persaudaraan;

9. Iis farida, Putri Maria, Khoironi Magfiroh, Larasati Kusumawardani, Siti Muamanah yang selalu memberi semangat dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman KKN 12 yang telah menjadi keluarga baru selama 45 hari;
11. Teman-teman IESP serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Jember, 16 Juli 2018

Yulita Dwi Anggraini

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PEMBIMBING | vi |
| HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| <i>ABSTRACT</i> | x |
| RINGKASAN | xi |
| PRAKATA | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB 1. PENDAHULUAN. | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Landasan Teori | 12 |
| 2.1.1 Pengertian Ketenagakerjaan | 12 |
| 2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja | 18 |
| 2.1.3 Penawaran Tenaga Kerja | 19 |
| 2.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi | 20 |
| 2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi | 21 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.6 Pengangguran | 24 |
| 2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 26 |
| 2.1.8 Upah | 29 |
| 2.1.9 Teori Pertumbuhan Penduduk | 30 |
| 2.1.10 Pendidikan. | 31 |
| 2.2 Pengaruh Hubungan Antara Variabel | 33 |
| 2.2.1 Hubungan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka . . . | 33 |
| 2.2.2 Hubungan UMK Terhadap Pengangguran Terbuka. . . | 34 |
| 2.2.2 Hubungan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka. | 35 |
| 2.2.3 Hubungan Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka. | 36 |
| 2.3 Penelitian Terdahulu | 36 |
| 2.4 Kerangka Konsep | 40 |
| 2.5 Hipotesis | 40 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN | 41 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 41 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 41 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data | 41 |
| 3.4 Metode Analisis Data | 41 |
| 3.4.1 Analisis Regresi Data Panel | 42 |
| 3.4.2 Uji Pemilihan Data Panel | 43 |
| 3.4.3 Uji Statistik | 45 |
| 3.4.4 Uji Asumsi Klasik | 48 |
| 3.5 Definisi Operasional Variabel | 50 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 51 |
| 4.1 Gambaran Umum. | 51 |
| 4.1.1 Letak Geografis di Jawa Timur. | 51 |
| 4.1.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur. | 53 |
| 4.1.3 Perkembangan Tingkat Upah di Jawa Timur. | 54 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.4 Perkembangan Jumlah Penduduk di Jawa Timur. | 55 |
| 4.1.5 Perkembangan Tingkat Pendidikan di Jawa Timur. | 57 |
| 4.1.6 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur. | 58 |
| 4.2 Hasil Analisis Data | 59 |
| 4.2.1 Hasil Pemilihan Model Terbaik Regresi Data Panel dengan Uji Chow. | 59 |
| 4.2.2 Hasil Pemilihan Model Terbaik Regresi Data Panel dengan Uji Hausman. | 60 |
| 4.2.3 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i> | 61 |
| 4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik. | 63 |
| 4.3 Pembahasan | 67 |
| 4.3.1 Hubungan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur. | 67 |
| 4.3.2 Hubungan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur. | 68 |
| 4.3.2 Hubungan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur. | 68 |
| 4.3.3 Hubungan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur. | 69 |
| BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN | 71 |
| 5.1 Kesimpulan | 71 |
| 5.2 Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |
| LAMPIRAN A | 76 |
| LAMPIRAN B | 84 |
| LAMPIRAN C | 85 |
| LAMPIRAN D | 86 |
| LAMPIRAN E | 87 |
| LAMPIRAN F | 88 |
| LAMPIRAN G | 89 |

DAFTAR TABEL

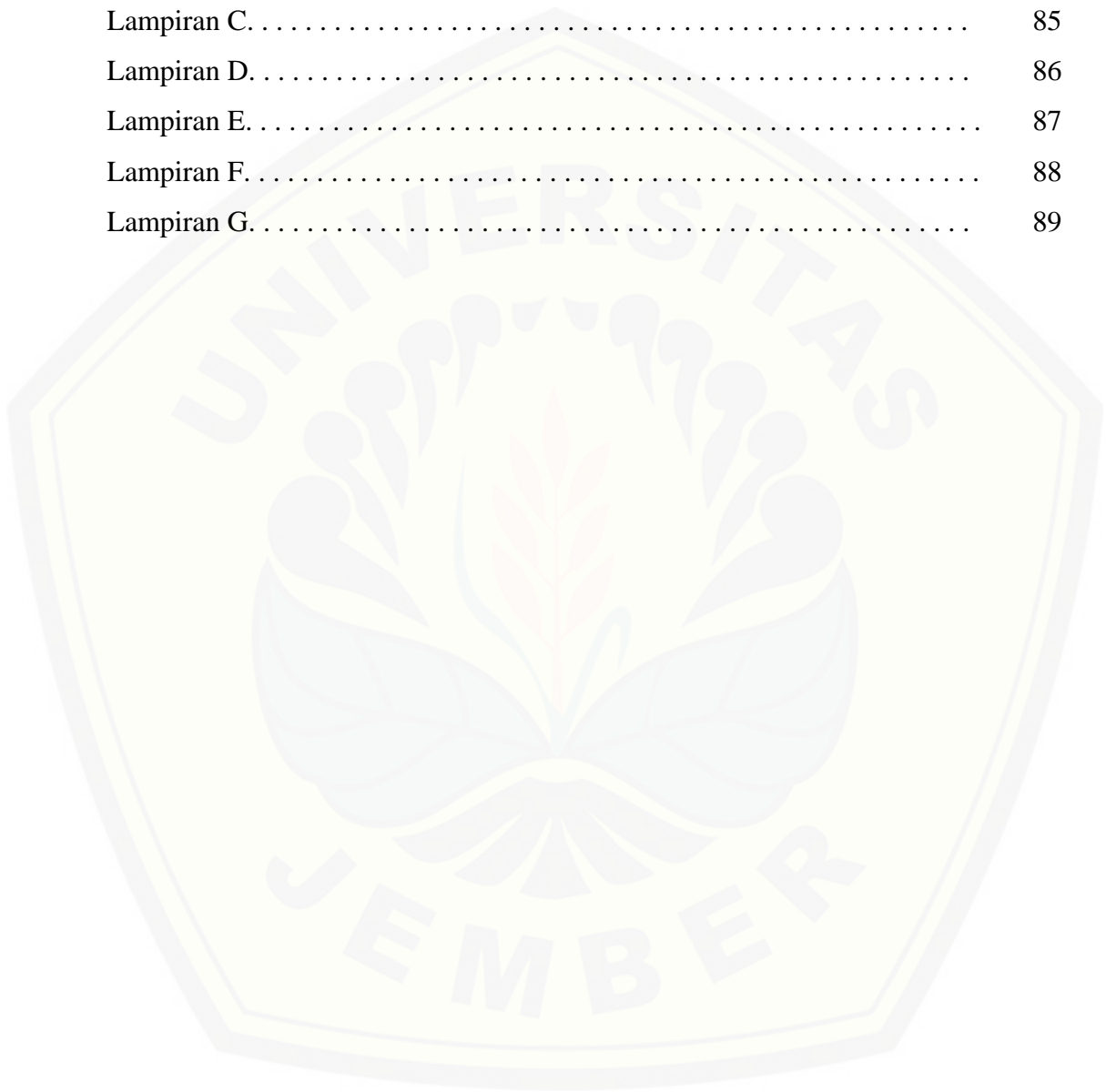
| | Hal |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Lima Provinsi di Indonesia Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Serta Tingkat Pengangguran pada Tahun 2015. | 3 |
| Tabel 1.2 Data tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur tahun 2010 -2015. | 4 |
| Tabel 1.3 Data penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan tahun 2012 - 2015 | 5 |
| Tabel 1.4 Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015 (Atas Dasar Harga Konstan 2010) | 6 |
| Tabel 1.6 Rata – rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015. | 7 |
| Tabel 1.6 Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (Tahun 2014-2015). | 9 |
| Tabel 4.1 Luas Daerah dan Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten/Kota. | 51 |
| Tabel 4.2 Suku Bangsa di Jawa. | 57 |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Chow | 60 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman. | 60 |
| Tabel 4.5 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i> | 61 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas. | 64 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi. | 65 |
| Tabel 4.8 Keputusan Uji Durbin Watson | 66 |
| Tabel 4.9 Uji Heterokedastisitas | 66 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|---|-----|
| Gambar 2.1 Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja. | 19 |
| Gambar 2.2 Kurva Hukum Okun. | 33 |
| Gambar 2.3 Kerangka Konsep. | 40 |
| Gambar 4.1 PDRB Sektor Pengolahan dan Tingkat PDRB Jawa Timur Tahun 2010 – 2016. | 54 |
| Gambar 4. Rata – rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan di Jawa Timur Tahun 2011 - 2015. | 55 |
| Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 – 2015 | 56 |
| Gambar 4.4 Suku Bangsa di Jawa Timur | 57 |
| Gambar 4.3 Tingkat Pendidikan Jawa Timur Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2010 – 2015 | 58 |
| Gambar 4.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2008 – 2017 | 59 |
| Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas | 64 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Hal |
|------------------|-----|
| Lampiran A | 76 |
| Lampiran B | 84 |
| Lampiran C | 85 |
| Lampiran D | 86 |
| Lampiran E | 87 |
| Lampiran F | 88 |
| Lampiran G | 89 |



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang harus dijalani oleh setiap negara untuk mengarah pada perekonomian yang lebih baik. Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk dan disertai berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber-sumber produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan riil per kapita (Jhingan, 2000).

Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitupun selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses perkembangan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa akan meningkat. Hal ini disebabkan karena faktor – faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah kualitasnya. Diantaranya, investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang, serta tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor – faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi lebih lambat dari potensinya (Sukirno, 2006:10).

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari

beberapa indikator perekonomian, salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Meningkatnya jumlah penduduk memicu meningkatnya jumlah angkatan kerja, tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja yang memadai sehingga berdampak kepada meningkatnya jumlah pengangguran (Sisputro, 2013)

Pada dasarnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pembagian pendapatan secara merata, meningkatkan hubungan ekonomi antara wilayah di dalam region maupun antar region dan mengembangkan ekonomi secara sektoral maupun antar atau lintas sektoral yang lebih menguntungkan dikaitkan atau didukung dengan strategi peningkatan sumber daya manusia. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka tidak menutup kemungkinan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat juga ikut meningkat.

Menurut Kuznets (dalam Jhingan, 2000:57), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau ketimpangan dalam mendapatkannya, dimana pertumbuhan angkatan kerja yang meningkat tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi di negara – negara berkembang lainnya. Permasalahannya berada pada jumlah penduduk yang cukup banyak yang tidak disusul dengan kesempatan kerja. Hal ini merupakan masalah yang sampai sekarang masih belum dapat diatasi yaitu pengangguran. Pengangguran terjadi karena struktur ekonomi belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang sesuai atau belum dapat menyerap penduduk menurut angkatan kerja. Pembangunan nasional melalui pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja secara tepat.

Beberapa permasalahan ekonomi makro yang menjadi penghambat pembangunan ekonomi pada negara Indonesia yaitu pengangguran. Pengangguran

merupakan masalah ekonomi yang terus menghantui masalah perekonomian di Indonesia. Ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja membuat meningkatnya jumlah pengangguran.

Penelitian terdahulu telah mengemukakan bahwa jumlah penduduk yang relatif banyak akan mempengaruhi bertambahnya pengangguran di suatu wilayah. Pertambahan penduduk dan hal – hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian kebenarannya tergantung pada kemampuan sistem ekonomi tersebut untuk menyerap dan memperkerjakan tambahan pekerja itu secara produktif (Arsyad, 1997).

Berikut merupakan data lima provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak serta tingkat pengangguran pada tahun 2015.

Tabel 1.1 Lima Provinsi di Indonesia Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Serta Tingkat Pengangguran pada Tahun 2015

| No. | Provinsi | Jumlah Penduduk (dalam ribu) | Tingkat Pengangguran (%) |
|-----|----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Jawa Barat | 46.709,60 | 8,72 |
| 2 | Jawa Timur | 38.847,56 | 4,47 |
| 3 | Jawa Tengah | 33.774,14 | 4,99 |
| 4 | Sumatera Utara | 13.937,797 | 6,12 |
| 5 | Banten | 11.955,243 | 7,75 |

Sumber : BPS, 2016 (diolah)

Menurut tabel 1.1, urutan Provinsi yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2015 adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Jawa Barat dengan posisi pertama mempunyai jumlah penduduk 46.709.600 orang, Jawa Timur dengan jumlah penduduk 38.847.560 orang, Jawa Tengah mempunyai jumlah penduduk sebanyak 33.774.140 orang, Sumatera Utara mempunyai jumlah penduduk sebanyak 13.937.797 orang, dan yang terakhir adalah Banten dengan jumlah penduduk sebanyak 11.955.243 orang. Jumlah penduduk yang banyak dan dengan pertumbuhannya yang meningkat dari tahun ke tahun sering menjadi penyebab

terjadinya pengangguran di daerah tersebut. Dapat dilihat dari tabel bahwa Provinsi Jawa Timur mempunyai jumlah pengangguran yang cukup banyak yaitu dengan proporsi 4,47 membuat jumlah pengangguran yang ada di Jawa Timur menempati peringkat tiga besar dalam hal pengangguran di Indonesia, yaitu sebanyak 1.736.485 orang. Selain itu, Jawa tengah dan Jawa Barat juga menduduki peringkat 3 besar dalam hal pengangguran, yaitu sebanyak 1.685.329 orang dan 4.073.077 orang (BPS, 2016). Berikut adalah data yang menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.2 Data tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur tahun 2011 - 2015

| No | Tahun | Jumlah (persen) |
|----|-------|-----------------|
| 1 | 2011 | 5,33 |
| 2 | 2012 | 4,09 |
| 3 | 2013 | 4,30 |
| 4 | 2014 | 4,19 |
| 5 | 2015 | 4,47 |

Sumber : BPS Jawa Timur, 2015 (Diolah)

Berdasarkan data tingkat pengangguran pada Tabel 1.2 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur dari tahun 2011 - 2015 cenderung naik turun. Menurut BPS pada tahun 2015 pengangguran terjadi sebesar 4,47 % naik dari tahun sebelumnya sebesar 0,28 %. Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,33%. Meningkatnya jumlah penduduk otomatis akan mengakibatkan meningkatnya jumlah angkatan kerja khususnya di Provinsi Jawa Timur. Namun meningkatnya angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan jumlah angkatan kerja tahun 2014. Berikut data perkembangan jumlah angkatan kerja yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2012 - 2015.

Tabel 1.3 Data penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan tahun 2012 - 2015

| Jenis Kegiatan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas | 29 088 183 | 29 282 929 | 29 578 682 | 29 884 845 |
| Angkatan Kerja | 20 238 054 | 20 432 453 | 20 149 998 | 20 274 681 |
| Bekerja | 19 411 256 | 19 553 910 | 19 306 508 | 19 367 777 |
| Pengangguran Terbuka | 826 798 | 878 543 | 843 490 | 906 904 |
| Bukan Angkatan Kerja | 8 850 129 | 8 850 476 | 9 428 684 | 9 610 164 |
| Sekolah | 2 149 534 | 2 071 265 | 2 318 138 | 2 302 395 |
| Mengurus Rumah Tangga | 5 251 834 | 5 343 825 | 5 725 112 | 5 924 108 |
| Lainnya | 1 448 761 | 1 435 386 | 1 385 434 | 1 383 661 |
| TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) | 69,57 | 69,78 | 68,12 | 67,84 |
| TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) | 4,09 | 4,30 | 4,19 | 4,47 |

Sumber : BPS Jawa Timur, 2015 (Diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 jumlah angkatan kerja tahun 2015 di Jawa Timur mencapai 20.274.681 jiwa atau bertambah sebesar 124.683 jiwa dibandingkan jumlah angkatan kerja tahun 2014 sebesar 20.149.998 jiwa. Jumlah angkatan kerja dalam kurun 4 tahun terakhir jumlahnya menunjukkan penurunan, dampaknya terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Jawa Timur dalam kurun waktu tersebut.

Berbeda halnya dengan jumlah pengangguran terbuka yang terjadi di Jawa Timur tahun 2015, terjadi peningkatan pengangguran terbuka akibat adanya kenaikan jumlah angkatan kerja. Dari seluruh angkatan kerja, yang terserap dalam lapangan kerja sekitar 95,53 persen atau 19.306.508 jiwa. Sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 4,47 persen atau 906.904 jiwa pada tahun 2015, relatif meningkat dibandingkan kondisi tahun 2014 yang mencapai 4,19 persen atau 843.490 jiwa. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sejalan dengan pertumbuhan lapangan kerja, menyebabkan jumlah pengangguran terbuka semakin tinggi. Dapat dikatakan tingkat pengangguran terbuka merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan suatu negara.

PDRB juga merupakan salah satu indikator untuk menentukan keberhasilan dalam menentukan kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004:108).

Sedangkan menurut BPS, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran dan meminimalkan ketimpangan pendapatan pada masyarakat. Kinerja pembangunan ekonomi dapat ditunjukkan melalui PDRB suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Artinya semakin tinggi PDRB per kapita maka akan semakin sejahtera penduduk yang menempati suatu wilayah tersebut.

Menurut BPS, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Tabel 1.4 dibawah ini menjelaskan tentang peningkatan PDRB Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011-2015.

Tabel 1.4 Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015 (Atas Dasar Harga Konstan 2010)

| Tahun | PDRB |
|-------|-------------|
| 2011 | 1.072.681,7 |
| 2012 | 1.201.448,2 |
| 2013 | 1.328.416,1 |
| 2014 | 1.484.143,1 |
| 2015 | 1.652.179,6 |

Sumber : BPS Jawa Timur, 2015 (diolah)

Berdasar data yang di dapat dari BPS Jawa Timur, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011 – 2015 cenderung mengalami peningkatan. Meskipun PDRB cenderung meningkat, pada kenyataannya masih belum menyerap tenaga kerja secara penuh, dengan kata lain

sangat terbatas dalam penyerapan tenaga kerjanya. Ini ditunjukkan pada pengangguran terbuka yang masih cenderung meningkat.

Pengaruh PDRB terhadap jumlah angkatan kerja dapat dilihat dari nilai peningkatan PDRB yang berarti jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta (Sisputro, 2013)

Upah merupakan salah satu faktor pendorong masyarakat ingin bekerja. Terus meningkatnya upah akan mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Menurut Mankiw (2003: 11) upah (harga tenaga kerja) sama halnya dengan harga - harga lainnya yakni ditentukan oleh permintaan dan penawarannya. Dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa.

Pentingnya pemberian upah kepada tenaga kerja yang sesuai dengan hasil pekerjaannya serta besarnya kebutuhan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha. Pada tabel 1.5 berikut ini disajikan tentang gambaran kenaikan upah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011 - 2015 sebagai berikut:

Tabel 1.5 Rata – rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015

| Tahun | Rata – Rata Upah |
|--------------|-------------------------|
| 2011 | 1 245 707 |
| 2012 | 1 323 456 |
| 2013 | 1 522 205 |
| 2014 | 1 574 956 |
| 2015 | 1 676 543 |

Sumber : BPS Jawa Timur, 2016(diolah)

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa rata – rata upah/gaji bersih (rupiah) buruh/karyawan selama sebulan Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami perkembangan. Pada tahun 2015 rata – rata upah/gaji bersih (rupiah) buruh/karyawan selama sebulan sebesar Rp. 1,67 juta meningkat sebanyak Rp.

101,59 ribu dibandingkan dengan rata – rata upah/gaji bersih di tahun 2014 sebesar Rp. 1,57 juta.

Tingkat pendidikan suatu masyarakat dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai modal dasar kemajuan bangsa. Menyelenggarakan pendidikan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh penduduk Jawa Timur menjadi prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang pendidikan (BPS, 2016).

Pendidikan juga merupakan salah satu penentu agar bangsa melangkah lebih maju dan dapat bersaing dengan negara – negara lain. Kurangnya Sumber daya manusia yang berkualitas, di mana pendidikan menjadi tolak ukur dari keberhasilan suatu negara. Sumber daya manusia yang berkualitas diciptakan dari pendidikan yang bermutu. Karena hal tersebut akan membangun pengetahuan, sikap dan rasa disiplin anak dalam terciptanya individu yang bermutu dan beretika. Dengan demikian, akan terlahir pula anak bangsa yang dapat melanjutkan perkembangan serta pertumbuhan wilayahnya (BPS, 2016).

Tingkat pendidikan yang dimiliki tenaga kerja akan mempengaruhi keputusan kapan mereka bekerja dengan membandingkan besarnya timbal balik yang didapat atau upah dengan tingkat pendidikan yang telah mereka tempuh (Simanjuntak, 1998).

Ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, membuat sebagian orang meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilannya. Namun fenomena yang sedang terjadi lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap. Hal ini diakibatkan, karena lulusan pendidikan tinggi tidak mau menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang dicapai, sehingga sebagian dari mereka menjadi pengangguran. Umumnya dalam mendapatkan suatu pekerjaan yang layak dilihat dari pendidikan yang ditamatkan (BPS, 2016).

Berikut data mengenai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan yang ditamatkan

Tabel 1.6 Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (Tahun 2014-2015)

| Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan | 2014 (%) | 2015 (%) |
|--|-----------------|-----------------|
| Tidak / Belum Pernah Sekolah | 0,4 | 0,91 |
| Tidak / Belum Tamat SD | 1,07 | 0,94 |
| SD | 2,35 | 1,7 |
| SLTP | 5,73 | 4,43 |
| SLTA Umum | 7,46 | 8,73 |
| SLTA Kejuruan | 10,53 | 11,74 |
| D I/II/III/IV | 4,27 | 8,11 |
| Universitas | 3,61 | 4,99 |
| Total | 4,19 | 4,47 |
| SMA + | 7,5 | 8,83 |

Sumber : BPS Jawa Timur, 2015(diolah)

Berdasarkan jenjang pendidikan ditamatkan, TPT penduduk dengan pendidikan tidak tamat SD, tamat SD dan tamat SLTP mengalami penurunan yaitu masing – masing sebesar 0,13 persen dan 1,30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jenjang pendidikan minimal SLTA mengalami peningkatan di tahun 2015. Tidak hanya jenjang pendidikan SLTA yang mengalami peningkatan, melainkan jenjang SLTA ke atas juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur semakin sadar akan pentingnya pendidikan.

TPT tertinggi terjadi pada penduduk yang berpendidikan SLTA kejuruan. Permasalahan yang terjadi adalah tingginya TPT Jawa Timur yang didorong oleh tingginya TPT penduduk dengan jenjang pendidikan SLTA kejuruan. Untuk mengatasi hal tersebut lulusan SLTA kejuruan harus meningkatkan keterampilan dan kualitasnya agar dapat terserap di dunia kerja. TPT penduduk dengan pendidikan Diploma/Akademi mengalami peningkatan sebesar 3,84 persen dari 4,27 persen menjadi 8,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan

Diploma/Akademi belum/tidak terserap pada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Pengangguran yang merupakan salah satu ukuran sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Meningkatnya pengangguran akan banyak menimbulkan masalah – masalah dalam perekonomian. Pengangguran terbuka yang ada di Jawa Timur hingga tahun 2015 menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong penganggur masih cukup tinggi yaitu mencapai 4,47 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya kebijakan pemerintah Jawa Timur dalam menanggulangi masalah pengangguran. Diharapkan faktor – faktor yang mempengaruhi pengangguran seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), UMK, angkatan kerja dan pendidikan dapat meminimalisir adanya pengangguran terbuka yang terjadi di Jawa Timur. Fenomena tersebut merupakan hal menarik untuk diamati lebih lanjut, yaitu tentang “Pengaruh PDRB, UMK, angkatan kerja dan Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur semakin tahun semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan naiknya jumlah angkatan kerja yang semakin membuat angka pengangguran terbuka di Jawa Timur juga ikut meningkat. Dari masalah – masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah UMK berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah angkatan kerja berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Pengaruh PDRB terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur
2. Pengaruh UMK terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur
3. Pengaruh angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur
4. Pengaruh pendidikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi bagi kalangan akademis mengenai kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur.
2. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah, dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pembaca yang berminat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Ketenagakerjaan

Manusia sebagai sumber daya pada mulanya diartikan sebagai tenaga kerja manusia ditinjau secara fisiknya saja. Dengan kemampuan fisiknya manusia berusaha mengambil manfaat materi yang tersedia dilingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah penduduk yang banyak merupakan sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan. Menurut Mangum (dalam Suroto, 1992:14) sumber daya manusia merupakan kegiatan manusia yang produktif dan berpotensi memberikan sumbangan yang produktif terhadap kegiatan ekonomi. Perilaku produktif manusia baik dalam bentuk tindakan nyata, sikap, dan fikiran merupakan pendukung bagi pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan suatu wilayah atau negara perlu diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Semakin lengkap dan tepat data tentang sumber daya manusia, semakin mudah dan tepat pula melakukan perencanaan pembangunan. Berdasarkan BPS Provinsi Jawa Timur memberikan pengertian dan definisi terhadap konsep atau penjelasan ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu suatu usaha / kegiatan ekonomi.

5. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Contoh:

- a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin / peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
 - b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).
 - c. Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya
6. Penganggur terbuka, terdiri dari:
 - a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
 - b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
 - c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
 - d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada "*An ILO Manual on Concepts and Methods*")

1. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:
 - a) Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - b) Mereka yang sudah pernah bekerja, tetapi karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - c) Mereka yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai pencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

2. Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja, dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah melakukan "tindakannya nyata", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, yang telah/sedang dilakukan.
 3. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai suatu usaha yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai pengusaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.
7. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
 8. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

- a. Setengah Pengangguran adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).
 - b. Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).
9. Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang sedang libur sekolah.
 10. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
 11. Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain 10 kegiatan tersebut, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.
 12. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
 13. Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu.

Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya.

14. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ usaha/ perusahaan/ kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) 2009.
15. Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini, didasarkan atas Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJPI) 2002 yang mengacu kepada *International Standard Classification of Occupations* (ISCO 88).
16. Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya.
17. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:
 - a. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
 - b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tidak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
 - c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.

- d. Buruh/karyawan/pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) pada usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
- f. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- g. Pekerja bebas pada sektor non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), pada usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- h. Pekerja keluarga/tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:

1. Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.
2. Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar.
3. Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar.

2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja

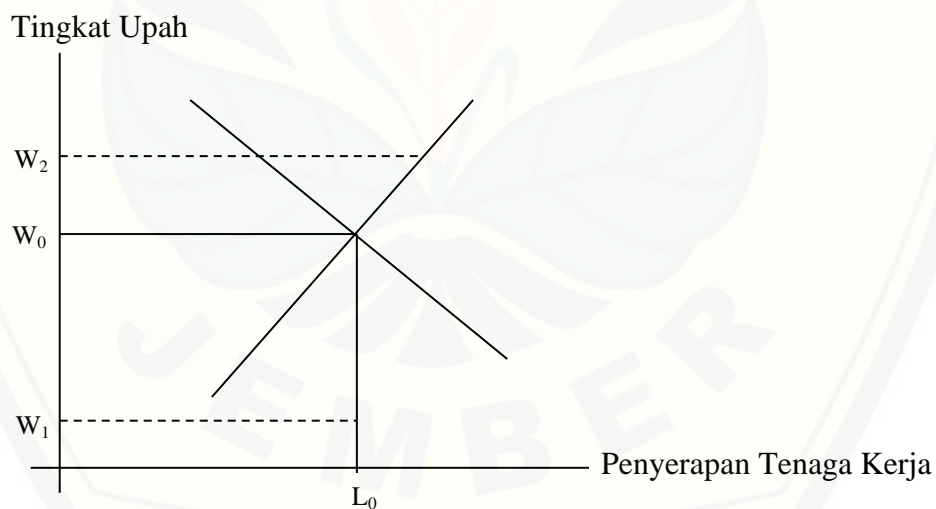
Permintaan tenaga kerja adalah kebutuhan terhadap tenaga kerja yang didasarkan atas kesediaan membayarkan upah tertentu sebagai imbalannya (Suroto, 1992:21). Menurut Sukirno (2000:69), permintaan atas tenaga kerja merupakan permintaan tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan barang - barang yang mereka jual. Perusahaan akan terus menambah jumlah pekerja selama pekerjaan tambahan tersebut akan menghasilkan penjualan tambahan yang melebihi upah yang dibayarkan kepadanya. Perusahaan akan berhenti menambah pekerjaannya apabila tambahan pekerjaan yang terakhir hanya dapat menghasilkan tambahan produksi yang sama nilainya. Permintaan tenaga kerja menggambarkan hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Menurut Sukirno (2005:6), apabila dilihat dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan atas tiga golongan, yaitu:

- a. Tenaga kerja kasar yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan
- b. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja
- c. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang ilmu tertentu.

2.1.3 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan orang yang mampu dan bersedia untuk melakukan pekerjaan dengan pertimbangan faktor upah (Suroto, 1992:22). Dalam hal ini pencari kerja bersedia menerima pekerjaan tersebut, atau menawarkan tenaganya apabila diberikan upah tertentu setiap waktunya. Penawaran dalam hal tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang para pemilik tenaga kerja siap untuk menyediakannya. Jika seseorang menawarkan tenaga kerja, maka sesungguhnya yang ditawarkan adalah waktu. Waktu yang sudah disepakati akan diisi aktivitas yang biasanya dirinci dalam suatu kesepakatan kerja. Satuan hitung bagi tenaga kerja sebenarnya adalah waktu (Afrida, 2003:64).

Penawaran tenaga kerja dapat menghasilkan pendapatan yang tidak akan diperoleh pada saat waktu luang (leisure time). Tenaga kerja diasumsikan berusaha untuk memaksimalkan kepuasan yang diperoleh, yang berhubungan dengan pendapatan yang sudah diperoleh.



Gambar 2.1 Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja (Sumber : Afrida, 2003)

Gambar 2.1 memperlihatkan keseimbangan di pasar tenaga kerja yang tercapai pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan tenaga kerja (SL) sama besarnya dengan yang diminta (DL) oleh perusahaan, yaitu pada tingkat upah equilibrium (W_0), sedangkan titik L_0 tercipta kesempatan kerja atau penyerapan tenaga kerja secara penuh (full employment). Artinya, pada tingkat upah

equilibrium tersebut semua orang menginginkan pekerjaan atau memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain sama sekali tidak terdapat pengangguran, kecuali pengangguran sukarela.

2.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Sukirno (2006:423) pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak ekonomi. Dengan kata lain pembangunan ekonomi, ahli ekonomi tidak hanya tertarik pada perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga pada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya meningkatkan sektor pertanian yang tradisional, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan. Berikut pembangunan menurut para ahli:

1. John Stuart Mill

Pembangunan ekonomi menurut John Stuart Mill dalam Jhinghan (2012:90) merupakan fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Sementara tanah dan tenaga kerja adalah dua faktor produksi yang asli, modal adalah persediaan yang dikumpulkan dari produk-produk tenaga kerja sebelumnya. Peningkatan kesejahteraan hanya mungkin bila tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibanding angkatan kerja. Kesejahteraan terdiri dari peralatan, mesin dan keterampilan angkatan kerja. Tenaga kerja produktif inilah yang merupakan pencipta kesejahteraan dan akumulasi modal.

2. Karl Marx

Menurut Karl Marx dalam Jhinghan (2012:73), teori pembangunan dalam tiga hal, yaitu dalam arti luas memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti sempit merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis dan terakhir menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana.

Menurut Marx, setiap struktur kelas masyarakat terdiri dari kelas pemilik tanah dan bukan pemilik tanah. Karena cara produksi tunduk pada

perubahan maka evolusi masyarakat akan terjadi apabila kekuatan produksi bertentangan dengan struktur kelas masyarakat.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2006:423), dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun teori – teori yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, John Stuart Mill. Menurut pandangan ahli – ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang – barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Klasik menitikberatkan perhatiannya terhadap pengaruh pertumbuhan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Luas tanah dan kekayaan alam jumlahnya tetap, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Menurut Klasik Dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berkembang. Pada mulanya penduduk yang sedikit dengan kekayaan alam yang berlebihan serta tingginya tingkat pengembalian modal atas investasi yang telah dibuat akan membuat pengusaha mendapatkan keuntungan yang besar. Namun hal tersebut tidak terus menerus akan berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya justru akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi, karena produktifitas penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran

masyarakat menurun kembali. Apabila keadaan ini tercapai akan menyebabkan ekonomi telah mencapai keadaan tidak berkembang. Teori pertumbuhan ekonomi menurut klasik menyatakan bahwa kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya (Sukirno, 2006:432).

2. Teori Keynes

Menurut Keynes pendapatan nasional bukan faktor – faktor produksi yang tersedia tetapi oleh pengeluaran agregat (AE). Pengeluaran agregat yang eujud dalam ekonomi selalu kurang dari pendapatan nasional, dan menyebabkan pengangguran tenaga kerja selalu terwujud (Sukirno, 2006:101).

3. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha akan terus menerus membuat pembaharuan – pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Dimana inovasi tersebut akan menghasilkan barang – barang baru, efisien dalam berproduksi, menciptakan pasar – pasar baru, serta dapat mengembangkan sumber bahan mentah baru. Dengan adanya pembaharuan tersebut akan mendorong produsen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, dengan cara meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Selanjutnya investasi yang baru akan meningkatkan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Dengan begitu pendapatan masyarakat akan bertambah begitupun seterusnya konsumsi masyarakat akan bertampah pula. Menurut Schumpeter semakin tinggi tingkat kemajuan ekonomi, semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya. Akan tetapi, berbeda

dengan pandangan klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan tinggi (Sukirno, 2006:434).

4. Teori Harrod – Domar

Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (*steady growth*) dalam jangka panjang. Dal teorinya Harrod-Domar menunjukkan bahwa walaupun pada tahun tertentu barang – barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya. Dengan kata lain, investasi yang berlaku tahun t akan menambah kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun berikutnya. Harrod-Domar menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan (Sukirno, 2006:435).

5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Sebagai perluasan teori Keynes, teori Harrod-Domar melihat persoalan pertumbuhan dari segi permintaan. Pertumbuhan agregat hanya akan berlaku apabila pengeluaran agregat melalui kenaikan investasi bertambah secara terus menerus pada tingkat pertumbuhan tertentu, yaitu sebesar $(I+\Delta I)$.

Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor – faktor produksi. Teori ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta Y = f, (\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

dimana :

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertumbuhan modal

ΔL = tingkat pertumbuhan penduduk

ΔT = tingkat perkembangan teknologi

Menurut Solow, faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Sejalan dengan Denison yang meneliti lebih lanjut tentang pertumbuhan ekonomi. Dimana Denison menunjukkan bahwa bukan modal, tetapi teknologi dan perkembangan keterampilan yang menjadi faktor utama yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006:437)

2.1.6 Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah yang sangat sulit dihindari oleh suatu negara maupun daerah. Pengangguran dapat menimbulkan masalah ekonomi maupun masalah sosial di masyarakat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat menurun. Semakin rendah angka pengangguran maka akan semakin meningkat taraf kesejahteraan hidup masyarakat suatu negara, begitu pula sebaliknya.

Menurut teori ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian akan selalu terjadi tenaga kerja penuh (*full employment*). Klasik berkeyakinan bahwa dalam perekonomian terdapat permintaan yang cukup besar, sehingga penawaran yang tinggi akan menciptakan permintaannya sendiri. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Keynes, dimana pada kenyataannya permintaan lebih sedikit dibanding penawarannya, sehingga terdapat faktor produksi yang menganggur.. Keynes berkeyakinan bahwa perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh itu jarang terjadi dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2008:79).

Menurut Sukirno (1994:14) Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Sejalan dengan pendapat Sukirno, pengangguran merupakan suatu kejadian atau keadaan dimana orang sedang menganggur atau orang yang mampu bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan ingin bekerja baik secara aktif maupun pasif mencari pekerjaan (Suroto, 1992:29).

Berdasarkan faktor – faktor yang menimbulkannya, pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, setengah pengangguran dan pengangguran sukarela atau tidak sukarela. (Sukirno, 1994:294)

- a) Pengangguran terbuka (*open unemployment*) : tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka termasuk pengangguran yang sangat banyak karena memang belum mendapat pekerjaan meskipun sudah berusaha untuk mencapai pekerjaan. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan timbulnya pengangguran terbuka, yaitu pengangguran konjungtur, pengangguran struktural dan pengangguran normal atau pengangguran friksional.
 - a. Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang diakibatkan karena adanya perubahan pada tingkat perekonomian. Saat ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan harus mengurangi produksinya. Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan harus mengurangi jam kerja dengan tidak menggunakan sebagian mesin produksi dan sebagian tenaga kerja juga diberhentikan. Dengan demikian kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran.
 - b. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan struktur dalam suatu kegiatan ekonomi.
 - c. Pengangguran normal adalah pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
- b) Pengangguran tersembunyi : Pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari kelebihan tenaga kerja dari yang dibutuhkan dalam suatu produksi. Misalkan, tanah pertanian yang dapat dikerjakan oleh 7 orang saja, namun dalam kenyataannya dikerjakan oleh 9 orang. Artinya penambahan tenaga kerja tidak akan menambah hasil produksi. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kelebihan 2 orang tenaga kerja. Kelebihan inilah yang disebut dengan pengangguran tersembunyi.

- c) Pengangguran musiman : Pengangguran yang terjadi pada waktu – waktu tertentu dalam satu tahun. Misalkan, petani yang sedang menunggu diantara waktu menuai dan masa menanam bibit, serta antara waktu menanam bibit dan masa panen. Jarak waktu menunggu pada masa tersebut, petani tidak memiliki pekerjaan. Namun Demikian pengangguran tersebut hanya berlaku pada waktu tertentu saja, sehingga disebut dengan pengangguran musiman.
- d) Setengah menganggur (*under unemployment*) : Pengangguran yang terjadi dimana jam kerja dari seorang tenaga kerja kurang dari jumlah jam kerja yang seharusnya dilakukan dalam suatu masa.

Menurut BPS, penganggur terbuka memiliki 3 kriteria yaitu (a) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; (b) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (c) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan BPS provinsi Jawa Timur, PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten /kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa. Dalam penghitungannya, untuk menghindari perhitungan ganda, nilai output bersih diberi nama secara spesifik, yaitu nilai tambah (*value added*). Demikian juga, harga yang digunakan dalam perhitungan ini adalah harga produsen. Penilaian pada harga konsumen akan menghilangkan PDRB subsektor perdagangan dan sebagian subsektor pengangkutan.

Menurut BPS, PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam

suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Cara penyajian PDRB disusun dalam dua bentuk, (BPS, 2016)

1. PDRB Atas Harga Konstan

Jumlah nilai produksi, pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga – harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riil. PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit).

2. PDRB Atas Harga Berlaku

Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atau ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu

daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit - unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa - jasa (termasuk jasa pemerintah).

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan Pendapatan:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk daerah dengan penduduk daerah lain. Sementara itu, PDRB berdasarkan penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun.
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang pemerintah daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan.

3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang - barang modal baru dari dalam daerah dan barang modal bekas atau baru dari luar daerah. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang.
4. Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya.
5. Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board (fob)*.
6. Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut *cost insurance freight (cif)*.

2.1.8 Upah

Menurut Sumarsono (2002: 114) upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau perundang – undangan serta dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Menurut Undang - Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 tentang upah, pada bab I, pasal 1, Ayat 30 :“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian kerja, kesepakatan, serta aturan perundang – undangan yang termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas jasa yang telah dilakukan”.

Bagian Kedua pada Bab X tentang Pengupahan Pasal 88 diatur sebagai berikut :

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. upah minimum;
 - b. upah kerja lembur;
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. upah karena menjalakan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proposional;
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan dalam pasal 89 ayat (1) upah minimum dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/kota.

2.1.9 Teori Pertumbuhan Penduduk

Teori pertumbuhan penduduk Menurut Maltus (dalam Arsyad, 1997) kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh

menurut deret hitung. Namun seiring dengan berkembangnya waktu teknologi dapat mengatasi masalah kekurangan pangan. Namun masalahnya apakah sumberdaya yang ada mampu mengolah atau menggunakan teknologi tersebut. Hal ini harus didukung adanya kemampuan dari sumber daya manusia dalam menguasai pengetahuan dan teknologi.

Menurut Sukirno (1997:68), perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pengangguran. Faktor pendorong diakibatkan karena memungkinkannya banyak tenaga kerja, yang bisa juga disebabkan oleh perluasan pasar. Perluasan pasar itu diakibatkan dua faktor penting yaitu jumlah pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, yang terdapat banyak pengangguran.

2.1.10 Pendidikan

Menurut Undang – Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan untuk meningkatkan perannya dimasa yang akan datang”. Pendapat lain tentang pengertian pendidikan dikemukakan oleh John S. Brubacher (dalam Sumitro 1998:17) yang menyatakan bahwa, “Pendidikan adalah proses dimana potensi – potensi, kemampuan – kemampuan, kapasitas – kapasitas manusia dipengaruhi oleh kebiasaan - kebiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan – kebiasaan yang baik, dengan alat (media) yang disusun sedemikian rupa, dan digunakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8) tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini (TK/RA), pendidikan dasar

(SD/MI), pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA), dan pendidikan tinggi (Universitas). Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta.

2. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Sanggar, dll.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pendidikan menurut BPS (2011) merupakan kegiatan belajar mengajar disegala tingkatan baik formal maupun informal. Keberadaan pendidikan merupakan khas yang hanya ada pada dunia manusia, dan sepenuhnya ditentukan oleh manusia, tanpa manusia pendidikan tidak pernah ada, *human life is just matter of education*.

Menurut Afrida (2003:77) pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang. Sedangkan menurut Sumarsono (2002:44) Pendidikan merupakan seseorang dapat meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan pendidikan. Dalam meningkatkan pendidikannya pada tiap – tiap tahun maka kemampuan bekerja dan pendapatan orang tersebut juga akan meningkat, namun di lain juga menunda penerimaan pendapatan karena orang tersebut masih bersekolah. Selain itu dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi akan mengeluarkan biaya pendidikan seperti, pembelian buku, alat tulis, uang sekolah dan lain - lain

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses dimana mengasah kemampuan seseorang untuk menerima suatu ilmu yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Dalam kegiatan pendidikan terdapat wadah yang memberikan ruang kepada seseorang untuk mempelajari dan menerima pengetahuan - pengetahuan umum maupun sosial. Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan taraf hidup manusia. Pendidikan juga mempengaruhi pola pikir manusia dalam menjalankan suatu kehidupan. Setiap peningkatan sumber daya manusia yang baik tidak dapat dilepaskan dari faktor pendidikan. Peningkatan pendidikan dapat menambah pendapatan seseorang, meskipun awalnya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk meraih pendidikan tinggi.

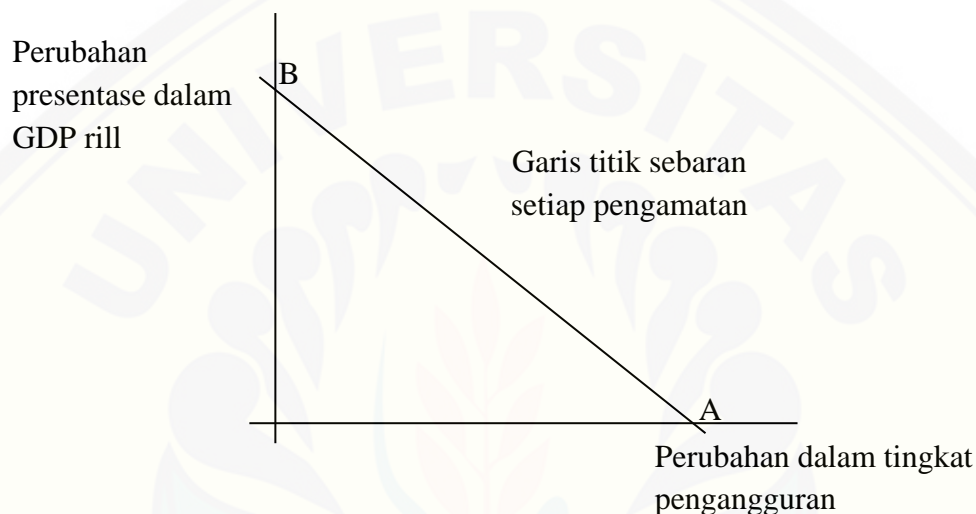
Hal ini sejalan dengan pendapat Borjas (dalam Kuseni dan Syafii, 2011:23) yang menyatakan bahwa pengangguran di negara – negara maju banyak terdapat pada yang berpendidikan rendah, karena semakin tinggi pendidikan maka semakin rendah penganggurannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar pola pikir dan cara berperilaku yang ditanamkan dalam dirinya dalam memainkan perannya di masyarakat. Pendidikan juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dimana masyarakat dengan pendidikan yang tinggi bisa merubah kehidupan sosialnya.

2.2 Pengaruh Hubungan Antara Variabel

2.2.1 Hubungan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka

PDRB merupakan suatu indikator pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan output nasional pada periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja yang berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran.

Arthur Okun sebagai pencetus Hukum Okun (dalam Mankiw 2007:251) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP (Gross Domestic Product) riil, yaitu terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP riil. Hal tersebut berarti terdapat hubungan positif antara kesempatan kerja dengan GDP riil. Okun menggunakan data tahunan dari Amerika Serikat untuk menunjukkan hukum Okun, yang ditunjukkan dengan gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kurva Hukum Okun (Sumber: Mankiw, 2007)

Kurva pada gambar 2.2 merupakan titik sebar dari perubahan tingkat pengangguran pada sumbu horizontal dan perubahan persentase dalam GDP riil pada sumbu vertikal. Gambar tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun sangat erat kaitannya dengan perubahan GDP riil, dari tahun ke tahun (Mankiw, 2007:251).

2.2.2 Hubungan UMK Terhadap Pengangguran Terbuka

Menurut kaum klasik perekonomian berkaitan dengan mekanisme pasar, dimana tidak akan ada pengangguran. Karena dalam kondisi seimbang (*equilibrium*) semua sumber daya termasuk pada tenaga kerja yang digunakan secara penuh. Masyarakat memilih bekerja dengan upah rendah, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali. Ketersediaan untuk bekerja dengan tingkat

upah lebih rendah membuat perusahaan memperkerjakan mereka lebih banyak. Namun hal tersebut dibantah oleh Keynes. Keynes berpendapat bahwa tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pendapat klasik, yakni bekerja dengan upah rendah. Tenaga kerja selalu mempunyai serikat kerja, dimana mereka akan berusaha memperjuangkan pekerja dari turunnya tingkat upah. Jika tingkat upah diturunkan, maka bisa jadi tingkat pendapatan masyarakat akan turun yang juga mempengaruhi daya beli masyarakat yang menurun. Turunnya daya beli masyarakat menyebabkan konsumsi secara keseluruhan akan berkurang serta mendorong turunnya harga - harga. Pada akhirnya, menurunnya harga – harga akan menyebabkan turunnya produksi yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan. Dengan demikian turunnya upah menyebabkan bertambahnya pengangguran.

2.2.3 Hubungan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun hambatan bagi ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, selanjutnya penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Selanjutnya penambahan penduduk yang terjadi dalam masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah mengalami masalah kelebihan penduduk. Apabila jumlah penduduk yang terlalu berlebihan tidak seimbang dengan faktor – faktor produksi lain yang tersedia, maka penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan produksi nasional (Sukirno, 2006:431).

Pesatnya kenaikan jumlah penduduk di Indonesia selain berpengaruh pada kepadatan penduduk juga mengakibatkan kenaikan angkatan kerja. Akan tetapi kenaikan jumlah penduduk yang begitu cepat tidak diimbangi dengan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang tersedia. Kesempatan kerja yang ada di Indonesia tidak mampu menyerap banyaknya angkatan kerja yang ada. Akibatnya angkatan kerja yang tidak mampu bersaing atau tidak memenuhi kriteria suatu pekerjaan tidak memiliki pekerjaan atau menganggur.

2.2.4 Hubungan Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka

Pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu dan uang. Namun setelah pendidikan diperoleh, masyarakat atau individu akan memperoleh manfaat daripada peningkatan dalam taraf pendidikan. Awalnya, individu yang memperoleh pendidikan cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pendapatan yang mungkin diperoleh (Sukirno, 2006:443).

Pengangguran juga dapat terjadi karena masyarakat tidak dapat memanfaatkan kesempatan kerja yang ada. Ketidakmampuan akan pemanfaatan tenaga kerja tersebut dapat disebabkan karena adanya ketidaksesuaian kriteria pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Pendidikan mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas yang sesuai dengan tuntutan pasar. Pendidikan akan mengangkat derajat atau status sosial seseorang. Kemajuan pada tingkat pendidikan beriringan dengan kemajuan ekonomi secara bersamaan. Peserta didik yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentang masalah pengangguran terbuka yang ada di Jawa Timur. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang hubungan variabel – variabel yang mengacu pada pengangguran. Cakupan pembahasan mengenai pengangguran memang memiliki keterkaitan dengan beberapa variabel. Diantaranya yaitu upah minimum, pertumbuhan penduduk, beban/tanggungan penduduk, IPM, investasi, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi, perbedaan penelitian ini yaitu dengan mengambil dan melihat beberapa variabel yang mempengaruhi pengangguran.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Sisputro pada tahun 2013 yang meneliti tentang “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi Dan Beban/Tanggungan Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990 –

2010". Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengangguran terbuka sebagai variabel dependen, serta PDRB, Upah Minimum Kota dan Beban/Tanggungans Penduduk sebagai variabel independennya. Analisis ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa Variabel bebas (PDRB, Inflasi, Upah, dan Beban/Tanggungans Penduduk) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Kota Magelang.

Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Gunawan pada tahun 2016 yang meneliti tentang "Pengaruh Pertumbuhan Angkatan Kerja dan pertumbuhan ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia". Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengangguran sebagai variabel dependen, serta PDRB, Angkatan kerja sebagai variabel independennya. Analisis ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pertumbuhan angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran Provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai F-probabilitasnya sebesar 0,0133 lebih kecil dari alfa 0,05 dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai F-probabilitasnya sebesar 0,5024 lebih kecil dari alfa 0,05.

Penelitian ketiga yaitu dilakukan oleh Panjawa pada tahun 2014 yang meneliti tentang "Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran". Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengangguran terbuka sebagai variabel dependen, serta PDRB, Inflasi, Upah Minimum, Jumlah Penduduk sebagai variabel independennya. Analisis ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 1999-2013.

Penelitian keempat yaitu dilakukan oleh Wijayanti pada tahun 2014 yang meneliti tentang "Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomidan Upah

imum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengangguran terbuka sebagai variabel dependen, serta Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum sebagai variabel independennya. Analisis ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran di Provinsi Bali. Secara parsial tingkat inflasi dan upah minimum memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Bali. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Bali.

Penelitian kelima yaitu dilakukan oleh Rohmah pada tahun 2018 yang meneliti tentang “Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2015”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jumlah Pengangguran terbuka sebagai variabel dependen, serta Angkatan Kerja, Pendidikan, Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel independennya. Analisis ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Angkatan kerja berpengaruh positif dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sementara pendidikan dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

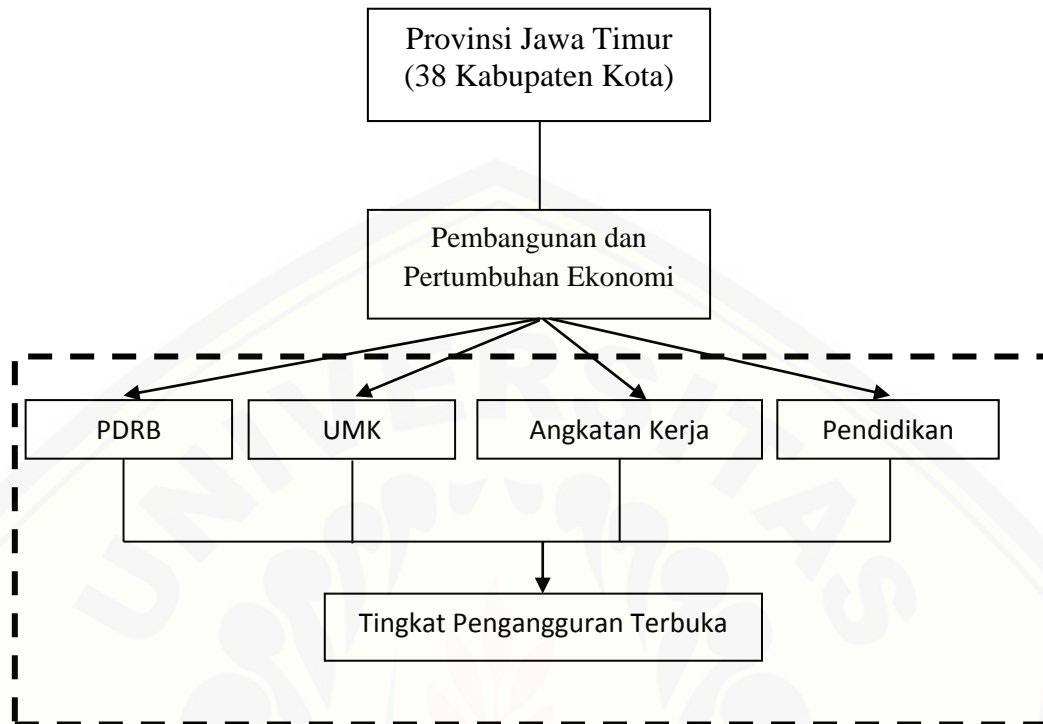
Penelitian keenam yaitu dilakukan oleh Suprayitno pada tahun 2016 yang meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran di Kota Semarang”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tingkat Pengangguran terbuka sebagai variabel dependen, serta Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, UMK, PDRB sebagai variabel independennya. Analisis ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini

menyatakan bahwa Jumlah penduduk yang berpendidikan (dari SD sd S1) berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Kota Semarang

| No | Peneliti | Judul | Variabel | Alat Analisis | Hasil |
|----|-------------------|--|--|-------------------------|--|
| 1 | Sisputro (2013) | Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi Dan Beban/Tanggungans Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990 – 2010 | Variabel dependen : Pengangguran Terbuka Variabel dependen : PDRB, Tingkat Upah Minimum Kota, Beban /Tanggungans Penduduk | Regresi Linier Berganda | Variabel bebas (PDRB, Inflasi, Upah, dan Beban/Tanggungans Penduduk) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Kota Magelang |
| 2 | Gunawan(2016) | Pengaruh Pertumbuhan Angkatan Kerjadan pertumbuhan ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia | Variabel dependen : Pengangguran Variabel dependen : Angkatan Kerja, PDRB | Regresi Linier Berganda | Pertumbuhan angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran Provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai F-probabilitasnya sebesar 0,0133 lebih kecil dari alfa 0,05 dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai F-probabilitasnya sebesar 0,5024 lebih kecil dari alfa 0,05. |
| 3 | Panjawa (2014) | Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran | Variabel dependen : Pengangguran Terbuka Variabel dependen : PDRB, Inflasi, Upah Minimum, Jumlah Penduduk | Regresi Data Panel | PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 1999-2013. |
| 4 | Wijayanti (2014) | Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomidan Upah inimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali | Variabel dependen : Pengangguran Terbuka Variabel dependen : Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum | Regresi Linier Berganda | Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran di Provinsi Bali. Secara parsial tingkat inflasi dan upah minimum memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Bali. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Bali. |
| 5 | Rohmah (2018) | Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PengangguranTerbuka Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2015 | Variabel dependen : Jumlah Pengangguran Variabel dependen : Angkatan Kerja, Pendidikan, Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah | Regresi Linier Berganda | Angkatan kerja berpengaruh positif dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sementara pendidikan dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikanterhadap pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. |
| 6 | Suprayitno (2016) | Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran di Kota Semarang | Variabel dependen : Tingkat Pengangguran Variabel dependen : Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, UMK, PDRB | Regresi Linier Berganda | Jumlah penduduk yang berpendidikan (dari SD sd S1) berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Kota Semarang |

Berdasarkan enam penelitian yang telah dilakukan menjelaskan hubungan antara variabel – variabel yang mengacu kepada pengangguran. Pengangguran merupakan seseorang usia produktif yang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar variabel PDRB, UMK, angkatan kerja dan pendidikan mempengaruhi pengangguran terbuka di Jawa Timur.

2.4 Kerangka Konsep



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. PDRB mempunyai pengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur.
2. UMK mempunyai pengaruh positif terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur.
3. Angkatan Kerja mempunyai pengaruh positif penduduk terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur
4. Pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *explanatory*. Penelitian *explanatory* menurut Sugiyono (2006) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel – variabel yang terdapat pada hipotesis. Dalam hal ini metode *explanatory* digunakan untuk menjelaskan pengaruh PDRB, UMK, Angkatan Kerja dan pendidikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil data yang sudah ada. Sumber data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur. Data sekunder yang terdiri dari PDRB Jawa Timur, UMK, Angkatan Kerja, pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Serta beberapa hasil studi keperpustakaan dan jurnal.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik secara pribadi seperti mencari di perpustakaan, internet maupun kelembagaan atau instansi yang sedang diteliti.

3.4 Metode Analisis Data

Pengaruh PDRB, UMK, Angkatan Kerja dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di Jawa Timur dapat diketahui menggunakan analisis regresi data panel dalam 5 tahun yaitu tahun 2011 - 2015.

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel

Menurut Gujarati (2003:125) Analisis Regresi merupakan alat analisis yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis ini dipilih karena untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya yang ada dalam analisis tersebut. Yang dimaksud dengan data panel yaitu data kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dengan antar individu (*cross section*). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai suatu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Persamaan data panelnya dapat dituliskan sebagai berikut :

$$tptit = \alpha + \beta_1 pdrbit + \beta_2 upahit + \beta_3 akkit + \beta_4 pdit + \mu it$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

tpt = tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur

upah = pertumbuhan PDRB atas harga konstan kabupaten/kota di Jawa Timur

umk = upah/gaji bersih kabupaten/kota di Jawa Timur

ak = jumlah penduduk kabupaten/kota di Jawa Timur

pd = pendidikan kabupaten/kota di Jawa Timur

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi variabel bebas

μit = komponen error di waktu t untuk unit cross section i

i = 1, 2, 3, ..., 38 (data cross section kabupaten/kota di Jawa Timur)

t = 1, 2, 3, 4 (data time series, tahun 2011-2015)

Berkaitan dengan penggunaan data panel dalam penelitian ini, maka setidaknya ada tiga teknik analisis yang digunakan yaitu (Gujarati, 2010:239) :

1. Model *common effect* (Pooled Least Square /PLS) atau koefisien antar waktu dan individu.

Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa setiap individu memiliki intersep dan slope yang sama. Dengan kata lain, regresi panel data yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap individu. Model ini merupakan teknik yang paling

sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu menggunakan metode OLS biasa.

2. Model *fixed effect* (Fixed Effect Model/FEM)

Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa intersep berbeda antar individu dan slope yang sama atau konstan. Dalam membedakan intersepanya dapat digunakan variabel dummy, sehingga metode ini juga dikenal dengan model *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

3. Model *random effect* (Random Effect Model/REM)

Model data panel yang di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (error component model) atau disebut juga model efek acak (random effect). Asumsinya adalah error secara individu juga tidak saling berkorelasi begitu juga dengan error kombinasinya. Model ini lebih dikenal sebagai *generalized least square* (GLS).

3.4.2 Uji Pemilihan Data Panel

Dalam memilih model regresi data panel dilakukan beberapa pengujian antara lain sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam chow test adalah :

Ho : model mengikuti *common effect* atau PLS

Ha : model mengikuti *fixed effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan $F_{Statistik}$ dan F_{tabel} . Perbandingan dipakai apabila hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka Ho ditolak berarti model yang paling tepat digunakan adalah model *fixed effect*. Begitu juga sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka Ho diterima berarti model yang paling tepat digunakan adalah model *common effect*.

Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus:

$$F = \frac{\frac{SSE1 - SSE2}{(n - 1)}}{\frac{SSE2}{(nt - n - k)}}$$

Keterangan :

SSE1 = Sum Square Error dari model *Common Effect*

SSE2 = Sum Square Error dari model *Fixed Effect*

Effect n = jumlah unit (*cross section*)

t = jumlah unit (*time series*)

k = jumlah variabel independen.

Sedangkan F tabel didapat dari :

$$F_{tabel} = \{ \alpha : df(n - 1, nt - n - nk) \}$$

Keterangan :

α = tingkat signifikansi yang dipakai

n = jumlah unit (*cross section*)

t = jumlah unit (*time series*)

k = jumlah variabel independen

Apabila dari hasil Uji Chow ditentukan bahwa model *common effect* yang digunakan, maka tidak perlu diuji dengan Uji Hausman. Akan tetapi apabila dari hasil Uji Chow tersebut ditentukan bahwa model *fixed effect* yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan uji hausman untuk memilih antara metode *fixed effect* atau metode *random effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel.

b. Uji Hausman

Setelah selesai melakukan Uji Chow dan didapatkan model yang tepat adalah *fixed effect*, maka selanjutnya akan diuji model manakah antara model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat, dan pengujian ini disebut sebagai Uji Hausman (*Hausman Test*).

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* dan *random effect* yang paling tepat digunakan. Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *fixed effect* sedangkan sebaliknya apabila nilai statistik hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *random effect*.

3.4.3 Uji Statistik

Uji statistik digunakan untuk menguji hubungan dari variabel bebas yaitu PDRB, UMK, angkatan kerja dan pendidikan terhadap variabel bebas yaitu pengangguran terbuka di Jawa Timur yaitu dengan uji F (simultan) dan uji t (parsial).

a. Uji F (uji secara simultan)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Adapun formulasi menurut Gujarati (2003:257) adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

dimana :

F = signifikasi hubungan kedua variabel

R^2 = koefisien determinasi

n = banyaknya pengamatan

k = jumlah variabel yang diamati

Hipotesis yang digunakan dalam uji F, adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (ada pengaruh dan signifikan)

Pengujian setiap koefisien regresi bersama-sama dikatakan signifikan bila nilai F hitung $>$ F tabel maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai F hitung \leq F tabel maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

b. Uji t (uji parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:84). Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel independen (PDRB, UMK, angkatan kerja dan pendidikan) berpengaruh terhadap variabel dependen (Tingkat Pengangguran terbuka di Jawa Timur). Dalam Pengujian hipotesis dengan uji t di gunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

dimana :

β_i : Koefisien Regresi

Se (β_i) : Standart error koefisien regresi

Adapun hipotesis yang digunakan untuk pengujian tersebut adalah :

- 1 $H_0 : \beta_1 = 0$, berarti tidak ada pengaruh dari variabel PDRB terhadap variabel pengangguran terbuka di Jawa Timur.
 $H_1 : \beta_1 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh dan signifikan dari variabel PDRB terhadap variabel pengangguran terbuka di Jawa Timur.
- 2 $H_0 : \beta_2 = 0$, berarti tidak ada pengaruh dari variabel UMK terhadap variabel pengangguran terbuka di Jawa Timur.
 $H_1 : \beta_2 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh dan signifikan dari variabel UMK terhadap variabel pengangguran terbuka di Jawa Timur.

3 $H_0 : \beta_3 = 0$, berarti tidak ada pengaruh dari variabel angkatan kerja terhadap variabel pengangguran terbuka di Jawa Timur.

$H_1 : \beta_3 \neq 0$ berarti terdapat pengaruh dan signifikan dari variabel angkatan kerja terhadap variabel pengangguran terbuka di Jawa Timur.

4 $H_0 : \beta_4 = 0$, berarti tidak ada pengaruh dari variabel pendidikan terhadap variabel pengangguran terbuka di Jawa Timur.

$H_1 : \beta_4 \neq 0$ berarti terdapat pengaruh dan signifikan dari variabel pendidikan terhadap variabel pengangguran terbuka di Jawa Timur.

β_i adalah koefisien variabel independen ke- i sebagai nilai parameter variabel hipotesis. Nilai nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X_i terhadap Y . Bila nilai t hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima dan bila nilai t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel yang bersangkutan ada pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel bebas yang diuji berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

c. R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. (Ghozali, 2006:83).

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah hubungan linear antar variabel independen. Dalam asumsi regresi linear klasik, antar variabel independen tidak diijinkan untuk saling kolerasi. Adanya multikolinieritas akan menyebabkan besarnya varian koefisien regresi yang berdampak pada lebarnya interval kepercayaan terhadap variabel bebas yang digunakan. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam suatu persamaan regresi (Gujarati, 2003:359) antara lain :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan suatu estimasi model yang sangat tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen
- b. Dengan melakukan regresi auxiliary yaitu meregresikan variabel independen dengan variabel penjelas lainnya kemudian membandingkan masing – masing nilai R^2 dalam persamaan ini lebih besar dari pada nilai R^2 model awal, maka model tersebut terkena multikolinieritas.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan dari pada pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi (berhubungan) dengan kesalahan pengganggu. Untuk menguji apakah dalam penelitian ini dijumpai autokorelasi maka digunakan *Uji Durbin Watson* (Gujarati, 2003:442). Cara pengujiannya adalah membandingkan nilai *Durbin Watson* yang dihitung (d) dengan nilai batas (d_U) dan nilai batas bawah (d_L) yang ada pada tabel *Durbin Watson*. Perumusan hipotesa disusun sebagai berikut:

- a. H_0 artinya terdapat autokorelasi positif atau negatif.
- b. H_a artinya tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif.

Dengan kriteria pengambilan keputusan :

- a. Jika $d < d_L$ atau $d > 4 - d_L$, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif,
 - b. Jika $d_U < d < 4 - d_U$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga tidak terjadi autokorelasi,
 - c. Jika $d_L < d < d_U$, berarti pengujian tidak dapat disimpulkan
3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menentukan apakah terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik scatter plot, jika hasil data menyebar, yaitu di atas dan di bawah nilai nol maka model regresi layak pakai karena bebas heteroskedastisitas (Gujarati, 2003:125).

4. Uji Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal atau tidak. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Uji normalitas juga bisa dilihat dengan tampilan grafik histogram. Apabila histogram hampir menyerupai genta dan titik *variance* semuanya mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas artinya layak pakai (Ghozali, 2006:110).

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi ilmiah yang menjelaskan variabel – variabel yang terkait dalam sebuah penelitian.

1. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, dan penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Data menggunakan data tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten/kota provinsi Jawa Timur periode 2011 – 2015 yang dinyatakan dalam persen.
2. PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu. Data menggunakan data PDRB menurut kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2015 (atas dasar harga konstan) yang dinyatakan dalam satuan milyar rupiah.
3. UMK adalah Mengacu pada tingkat upah minimum dan lainnya, seperti yang telah ditentukan dalam peraturan atau hukum mengenai upah. Penghitungan rata-rata upah pekerja setiap hari didasarkan pada banyaknya upah yang diterima oleh pekerja dibagi dengan banyaknya hari kerja pekerja dalam periode waktu yang sama. Data dalam penelitian ini menggunakan data UMK kabupaten/kota tahun 2011 – 2015 yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
4. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Data menggunakan data penduduk menggunakan data angkatan kerja menurut kabupaten/kota provinsi Jawa Timur periode 2011 – 2015 yang dinyatakan dalam satuan jiwa.
5. Pendidikan merupakan jangka waktu seseorang menjalani secara pendidikan formal. Data menggunakan data rata – rata lama sekolah menurut kabupaten/kota provinsi Jawa Timur menggunakan periode 2011 – 2015 yang dinyatakan dalam satuan tahun.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode *fixed effect* dan pembahasan pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Artinya jika nilai dari PDRB naik maka tidak mempengaruhi nilai dari tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur
2. UMK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Artinya jika nilai dari UMK naik maka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur akan turun.
3. Angkatan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Artinya jika nilai dari angkatan kerja naik maka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur akan turun.
4. Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Artinya semakin tinggi pendidikan tidak akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur.

5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa saran untuk mengatasi pengangguran dari penelitian ini yaitu:

1. Aktivitas pada sektor-sektor perekonomian yang produktif perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan PDRB, selanjutnya meningkatnya PDRB dapat menggerakkan perekonomian sehingga lapangan kerja baru akan tercipta.
2. Diperlukan program pelatihan khusus bagi penduduk usia produktif yang belum memiliki pekerjaan sehingga dapat menciptakan tenaga kerja dengan *skill* dan pengetahuan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, BR. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Aprianto, Dharfan. Khairunnisa, Ulfah. 2013. Hubungan Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Proceeding PESAT Vol.5 ISSN 1858-2559*.
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Empat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Basuki, Agus Tri. 2014. *Regresi Model PAM, ECM, dan Data Panel dengan EVIEWS 7*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. 2016. *Indikator Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur 2016*. Surabaya.
- Badan Pusat Stastistika (BPS) Provinsi Jawa Timur. 2018. *Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten/Kota*. Surabaya.
- Badan Pusat Statistika (BPS). 2018. *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2018*. Indonesia.
- Badan Pusat Statistika (BPS). 2017. *Struktur Perekonomian RI Masih Didominasi Pulau Jawa*. Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (BAPPEDA). 2016. *Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2016*. Surabaya.
- Darman. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran: Analisis Hukum Okun. *Journal The Winnes Vol.14 No.1*
- Firdhania, Riza. 2016. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jember*. Skripsi. Universitas Jember
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Ekonometrika Dasar. Terjemahan: Sumaro Zain*. Erlangga: Jakarta.

- Gujarati Damodar N. dan Porter Dawn C. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 jilid 2*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Gunawan, Andy. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Angkatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* Vol. 6 No. 2
- Hartanto, Trianggono Budi. Masjkuri, Siti Umajah. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* ISSN 2541-1470.
- Iswanto, Diyan Ari. Maski, Ghozali. 2013. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran: Validasi Hukum Okun di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- J. Supranto, 2001. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Cetakan Kedua. Erlangga: Jakarta.
- Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press: Jakarta.
- Jhingan. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press: Jakarta.
- Kusreni, Sri, & Syafii, Achmad. 2011. Disparitas Gender Dalam Antar Wilayah Di Jawa Timur: Studi Diskriptif Ekonomi Demografis Dengan Pendekatan Gender – Related Development Index. *Jurnal Ekonomi Regional* Vol.6 No.1.
- Kasanah, Yunani Tiya. 2016. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2014*. Skripsi. Universitas Jember
- Mankiw, N. Gregory, 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muana Nanga. 2001. *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Press
- Nachrowi, D. N. dan H. Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI
- Petkov, B. 2008. *The Labour Market and Output in the UK – Does Okun's Law Still Stand? Discussion Papers Bulgarian National Bank*.

- Panjawa, Jihad Lukis. Soebagiyo, Daryono. 2014. Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 15 Nomor 1.
- Pitartono, Ronny. Hayati, Banatul. 2012. Analisis Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1997 – 2010. *Diponegoro Journal of Economics* Volume 1 Nomor 1.
- Prasetyo, Nurdiansyah Rifan. 2015. *Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 1991– 2013*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang
- Rohman, Aam Latifah Pauzia. 2018. *Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2015*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sakti, Dian Candra. Berachim, Bustani. 2016. Pengaruh Output Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Propinsi Jawa Timur (Tahun 2005 – 2013). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga* Vol. XXVI No.2
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1992. *Makro Ekonomi, Edisi Keempat belas*. Erlangga: Jakarta
- Sari, Ruli Sartika. Budiantara, I Nyoman. 2012. Permodelan Pengangguran Terbuka di Jawa Timur dengan Menggunakan Pendekatan Regresi Spline Multivariabel. *Jurnal Sains dan Seni ITS* Vol. 1 ISSN 2301-928X.
- Simanjuntak, Payaman. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sisputro, Akbar. 2013. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi Dan Beban/Tanggungannya Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990 – 2010*. Skripsi. Universitas Diponegoro
- Soekarnoto. 2014. Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* XXIV No.02.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Cetakan Pertama. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Sukirno, Sadono. 1997. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Edisi 2. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. UI-Press: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2002. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Jember: Universitas Jember.
- Sumitro, dkk. 1998. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP YOGYAKARTA: Yogyakarta.
- Suprayitno, Iswahyudi Joko. Dasyah, Moh.Yamin. Rahayu, Ujiati Suci. 2016. Pengaruh Tingkay Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran di Kota Semarang. *Jurnal UNIMAS*.
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Suwarni. 2016. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran di Kota Makassar Tahun 2002 – 2014. *Jurnal UIN Alauddin Makasar*.
- Wijayanti, Ni Nyoman Setya Ari. Karmini, Ni Luh. 2014. Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud* 3(10).

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. DATA PENELITIAN

| Kabupaten/Kota | Tahun | TPT | PDRB | UMK | AK | PD |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Pacitan | 2011 | 1.54 | 7,246 | 705.000 | 351322 | 7.07 |
| Pacitan | 2012 | 1.02 | 7,705 | 750.000 | 342849 | 6.71 |
| Pacitan | 2013 | 0.99 | 8,158 | 887.250 | 343078 | 6.88 |
| Pacitan | 2014 | 1.08 | 8,582 | 1.000.000 | 349055 | 7.27 |
| Pacitan | 2015 | 0.97 | 9,020 | 1.150.000 | 353172 | 7.37 |
| Ponorogo | 2011 | 6.79 | 9,472 | 705.000 | 478907 | 6.81 |
| Ponorogo | 2012 | 3.14 | 10,038 | 745.000 | 499650 | 7.18 |
| Ponorogo | 2013 | 3.25 | 10,555 | 924.000 | 490113 | 7.49 |
| Ponorogo | 2014 | 3.66 | 11,104 | 1.000.000 | 496443 | 7.28 |
| Ponorogo | 2015 | 3.68 | 11,686 | 1.150.000 | 485245 | 7.05 |
| Trenggalek | 2011 | 3.27 | 8,435 | 710.000 | 410215 | 7.39 |
| Trenggalek | 2012 | 2.98 | 8,960 | 760.000 | 412033 | 7.31 |
| Trenggalek | 2013 | 4.04 | 9,497 | 903.900 | 414400 | 7.29 |
| Trenggalek | 2014 | 4.20 | 9,998 | 1.000.000 | 399084 | 7.41 |
| Trenggalek | 2015 | 2.46 | 10,501 | 1.150.000 | 404547 | 7.65 |
| Tulungagung | 2011 | 3.56 | 17,845 | 720.000 | 547012 | 8.04 |
| Tulungagung | 2012 | 3.10 | 18,999 | 815.000 | 553749 | 7.95 |
| Tulungagung | 2013 | 2.71 | 20,164 | 1.007.900 | 551362 | 7.86 |
| Tulungagung | 2014 | 2.42 | 21,265 | 1.107.000 | 565151 | 7.89 |
| Tulungagung | 2015 | 3.95 | 22,327 | 1.273.050 | 547466 | 8.16 |
| Blitar | 2011 | 3.91 | 17,094 | 750.000 | 593036 | 7.44 |
| Blitar | 2012 | 2.82 | 18,055 | 820.000 | 636500 | 7.20 |
| Blitar | 2013 | 3.64 | 18,967 | 946.840 | 626254 | 7.22 |

| | | | | | | |
|------------|------|------|--------|-----------|---------|------|
| Blitar | 2014 | 3.08 | 19,920 | 1.000.000 | 606076 | 7.49 |
| Blitar | 2015 | 2.79 | 20,926 | 1.260.000 | 597639 | 7.64 |
| Kediri | 2011 | 8.33 | 19,355 | 934.500 | 763882 | 7.86 |
| Kediri | 2012 | 4.08 | 20,538 | 999.000 | 801966 | 7.62 |
| Kediri | 2013 | 4.65 | 21,734 | 1.089.950 | 791101 | 7.75 |
| Kediri | 2014 | 4.91 | 22,889 | 1.135.000 | 785650 | 7.88 |
| Kediri | 2015 | 5.02 | 24,006 | 1.305.250 | 800894 | 7.82 |
| Malang | 2011 | 5.51 | 44,091 | 1.077.600 | 1257768 | 6.85 |
| Malang | 2012 | 3.75 | 47,076 | 1.130.500 | 1328223 | 7.08 |
| Malang | 2013 | 5.17 | 49,572 | 1.343.700 | 1310685 | 7.08 |
| Malang | 2014 | 4.83 | 52,550 | 1.635.000 | 1273597 | 7.17 |
| Malang | 2015 | 4.95 | 55,316 | 1.962.000 | 1292343 | 7.24 |
| Lumajang | 2011 | 3.16 | 15,144 | 740.700 | 481290 | 6.18 |
| Lumajang | 2012 | 4.60 | 16,053 | 825.391 | 526129 | 6.18 |
| Lumajang | 2013 | 2.01 | 16,950 | 1.011.950 | 515451 | 6.52 |
| Lumajang | 2014 | 2.83 | 17,852 | 1.120.000 | 514666 | 6.62 |
| Lumajang | 2015 | 2.60 | 18,678 | 1.288.000 | 532005 | 6.26 |
| Jember | 2011 | 3.34 | 35,208 | 875.000 | 1213495 | 6.79 |
| Jember | 2012 | 3.77 | 37,262 | 920.000 | 1149629 | 6.24 |
| Jember | 2013 | 3.94 | 39,519 | 1.091.950 | 1169366 | 6.28 |
| Jember | 2014 | 4.64 | 41,969 | 1.270.000 | 1157462 | 6.24 |
| Jember | 2015 | 4.77 | 44,204 | 1.460.500 | 1173139 | 6.44 |
| Banyuwangi | 2011 | 6.06 | 34,720 | 865.000 | 781310 | 6.96 |
| Banyuwangi | 2012 | 3.41 | 37,236 | 915.000 | 882062 | 7.25 |
| Banyuwangi | 2013 | 4.65 | 39,734 | 1.086.400 | 879516 | 7.12 |
| Banyuwangi | 2014 | 7.17 | 41,998 | 1.240.000 | 841190 | 7.10 |
| Banyuwangi | 2015 | 2.55 | 44,524 | 1.426.000 | 893816 | 6.99 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|-----------|---------|-------|
| Bondowoso | 2011 | 3.01 | 9,033 | 735.000 | 389032 | 5.58 |
| Bondowoso | 2012 | 3.60 | 9,583 | 800.000 | 410708 | 5.94 |
| Bondowoso | 2013 | 2.04 | 10,140 | 946.000 | 394186 | 5.65 |
| Bondowoso | 2014 | 3.72 | 10,652 | 1.105.000 | 416145 | 5.36 |
| Bondowoso | 2015 | 1.75 | 11,179 | 1.270.750 | 424851 | 5.85 |
| Situbondo | 2011 | 4.77 | 8,927 | 733.000 | 347985 | 6.33 |
| Situbondo | 2012 | 3.33 | 9,412 | 802.500 | 358182 | 5.81 |
| Situbondo | 2013 | 3.01 | 9,994 | 1.048.000 | 355849 | 6.05 |
| Situbondo | 2014 | 4.15 | 10,572 | 1.071.000 | 348546 | 6.36 |
| Situbondo | 2015 | 3.57 | 11,087 | 1.209.900 | 364834 | 6.41 |
| Probolinggo | 2011 | 2.80 | 15,913 | 814.000 | 613512 | 5.63 |
| Probolinggo | 2012 | 1.92 | 16,937 | 888.500 | 636680 | 5.92 |
| Probolinggo | 2013 | 3.30 | 17,809 | 1.198.600 | 618642 | 6.31 |
| Probolinggo | 2014 | 1.47 | 18,681 | 1.353.750 | 601353 | 5.90 |
| Probolinggo | 2015 | 2.51 | 19,570 | 1.556.800 | 601681 | 6.09 |
| Pasuruan | 2011 | 4.30 | 65,272 | 1.107.000 | 819448 | 6.39 |
| Pasuruan | 2012 | 6.38 | 70,167 | 1.252.000 | 819011 | 6.83 |
| Pasuruan | 2013 | 4.34 | 75,044 | 1.720.000 | 831812 | 6.83 |
| Pasuruan | 2014 | 4.43 | 80,105 | 2.190.000 | 843685 | 7.06 |
| Pasuruan | 2015 | 6.41 | 84,412 | 2.700.000 | 815028 | 7.10 |
| Sidoarjo | 2011 | 8.65 | 87,212 | 1.107.000 | 1048577 | 9.89 |
| Sidoarjo | 2012 | 5.37 | 93,544 | 1.252.000 | 1012290 | 9.92 |
| Sidoarjo | 2013 | 4.12 | 99,993 | 1.720.000 | 1039833 | 10.23 |
| Sidoarjo | 2014 | 3.88 | 106,436 | 2.190.000 | 1069708 | 10.11 |
| Sidoarjo | 2015 | 6.30 | 112,013 | 2.705.000 | 1083519 | 10.46 |
| Mojokerto | 2011 | 6.79 | 36,406 | 1.105.000 | 524426 | 7.98 |
| Mojokerto | 2012 | 3.35 | 39,047 | 1.234.000 | 557832 | 7.94 |

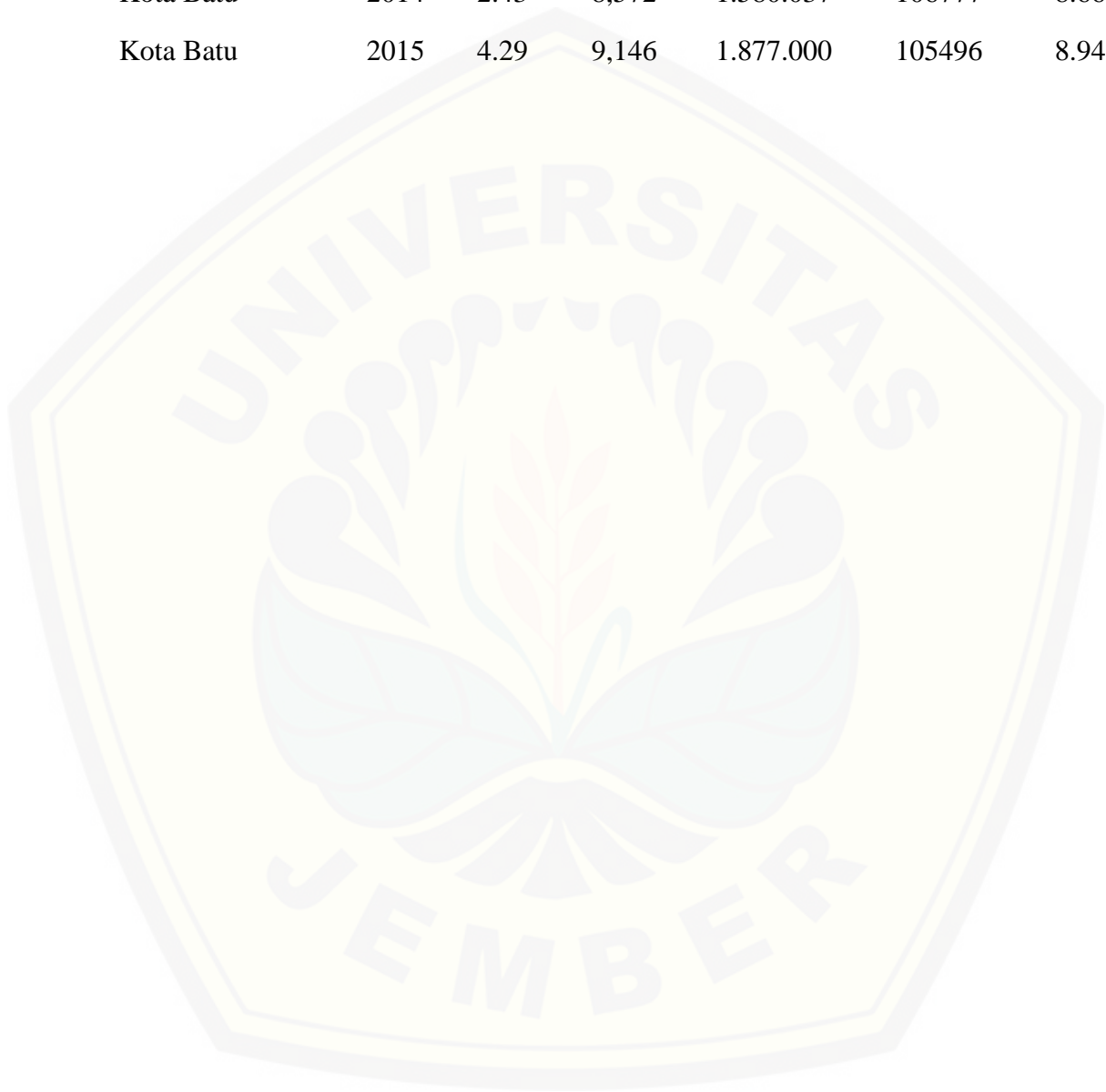
| | | | | | | |
|-----------|------|------|--------|-----------|--------|------|
| Mojokerto | 2013 | 3.16 | 41,608 | 1.700.000 | 545669 | 8.22 |
| Mojokerto | 2014 | 3.81 | 44,292 | 2.050.000 | 553405 | 8.32 |
| Mojokerto | 2015 | 4.05 | 46,793 | 2.695.000 | 575330 | 8.19 |
| Jombang | 2011 | 6.58 | 18,385 | 866.500 | 596506 | 7.89 |
| Jombang | 2012 | 6.72 | 19,515 | 978.200 | 611133 | 8.04 |
| Jombang | 2013 | 5.59 | 20,672 | 1.200.000 | 593902 | 8.03 |
| Jombang | 2014 | 4.39 | 21,793 | 1.500.000 | 604172 | 8.28 |
| Jombang | 2015 | 6.11 | 22,960 | 1.725.000 | 647442 | 8.10 |
| Ngajuk | 2011 | 6.31 | 12,061 | 710.000 | 512364 | 7.29 |
| Ngajuk | 2012 | 4.09 | 12,767 | 785.000 | 530573 | 7.61 |
| Ngajuk | 2013 | 4.73 | 13,456 | 960.200 | 549393 | 7.36 |
| Ngajuk | 2014 | 3.93 | 14,143 | 1.131.000 | 534007 | 7.67 |
| Ngajuk | 2015 | 2.10 | 14,876 | 1.265.000 | 516973 | 7.80 |
| Madiun | 2011 | 4.96 | 8,609 | 720.000 | 357771 | 7.46 |
| Madiun | 2012 | 3.99 | 9,136 | 775.000 | 364358 | 7.30 |
| Madiun | 2013 | 4.63 | 9,654 | 960.750 | 366133 | 7.39 |
| Madiun | 2014 | 3.38 | 10,170 | 1.045.000 | 362786 | 7.74 |
| Madiun | 2015 | 6.99 | 10,705 | 1.196.000 | 351752 | 7.54 |
| Magetan | 2011 | 3.95 | 8,745 | 705.000 | 352775 | 7.63 |
| Magetan | 2012 | 3.64 | 9,251 | 750.000 | 355505 | 7.85 |
| Magetan | 2013 | 2.96 | 9,793 | 866.250 | 353328 | 7.76 |
| Magetan | 2014 | 4.28 | 10,292 | 1.000.000 | 343550 | 7.99 |
| Magetan | 2015 | 6.05 | 10,824 | 1.150.000 | 352826 | 8.15 |
| Ngawi | 2011 | 5.10 | 8,973 | 725.000 | 419089 | 6.44 |
| Ngawi | 2012 | 2.94 | 9,568 | 780.000 | 422524 | 6.76 |
| Ngawi | 2013 | 4.97 | 10,094 | 900.000 | 472088 | 6.94 |
| Ngawi | 2014 | 5.61 | 10,681 | 1.040.000 | 437374 | 7.04 |

| | | | | | | |
|------------|------|------|--------|-----------|--------|------|
| Ngawi | 2015 | 3.99 | 11,224 | 1.150.000 | 431031 | 6.72 |
| Bojonegoro | 2011 | 5.70 | 36,751 | 870.000 | 612385 | 6.79 |
| Bojonegoro | 2012 | 3.42 | 38,136 | 930.000 | 656394 | 6.67 |
| Bojonegoro | 2013 | 5.81 | 39,039 | 1.029.500 | 695281 | 6.68 |
| Bojonegoro | 2014 | 3.21 | 39,934 | 1.140.000 | 628363 | 6.73 |
| Bojonegoro | 2015 | 5.01 | 46,893 | 1.311.000 | 640266 | 7.28 |
| Tuban | 2011 | 3.69 | 29,934 | 935.000 | 573558 | 6.56 |
| Tuban | 2012 | 4.13 | 31,816 | 970.000 | 580625 | 6.53 |
| Tuban | 2013 | 4.30 | 33,679 | 1.144.400 | 617366 | 6.82 |
| Tuban | 2014 | 3.63 | 35,519 | 1.370.000 | 569185 | 6.81 |
| Tuban | 2015 | 3.03 | 37,255 | 1.575.500 | 603039 | 6.83 |
| Lamongan | 2011 | 6.14 | 17,361 | 900.000 | 580256 | 7.24 |
| Lamongan | 2012 | 4.75 | 18,563 | 950.000 | 621617 | 7.59 |
| Lamongan | 2013 | 4.93 | 19,849 | 1.075.700 | 644188 | 7.79 |
| Lamongan | 2014 | 4.30 | 21,100 | 1.220.000 | 611621 | 7.86 |
| Lamongan | 2015 | 4.10 | 22,317 | 1.410.000 | 633048 | 7.61 |
| Gresik | 2011 | 5.93 | 62,899 | 1.133.000 | 569098 | 8.70 |
| Gresik | 2012 | 6.78 | 67,249 | 1.257.000 | 571038 | 8.98 |
| Gresik | 2013 | 4.55 | 71,314 | 1.740.000 | 619688 | 8.91 |
| Gresik | 2014 | 5.06 | 76,337 | 2.195.000 | 592569 | 8.87 |
| Gresik | 2015 | 5.67 | 81,359 | 2.707.500 | 611721 | 9.31 |
| Bangkalan | 2011 | 6.37 | 16,407 | 850.000 | 444868 | 5.21 |
| Bangkalan | 2012 | 5.13 | 16,174 | 885.000 | 468379 | 5.74 |
| Bangkalan | 2013 | 6.78 | 16,204 | 983.800 | 474876 | 5.66 |
| Bangkalan | 2014 | 5.68 | 17,370 | 1.102.000 | 473411 | 5.94 |
| Bangkalan | 2015 | 5.00 | 16,907 | 1.267.300 | 481352 | 5.79 |
| Sampang | 2011 | 2.13 | 10,315 | 725.000 | 470171 | 4.05 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|-----------|--------|-------|
| Sampang | 2012 | 1.71 | 10,911 | 800.000 | 491219 | 4.12 |
| Sampang | 2013 | 4.68 | 11,624 | 1.104.600 | 469711 | 4.39 |
| Sampang | 2014 | 2.22 | 11,633 | 1.120.000 | 507605 | 4.62 |
| Sampang | 2015 | 2.51 | 11,875 | 1.231.650 | 459000 | 4.84 |
| Pamekasan | 2011 | 2.61 | 7,429 | 925.000 | 453061 | 6.24 |
| Pamekasan | 2012 | 2.29 | 7,894 | 975.000 | 472147 | 6.32 |
| Pamekasan | 2013 | 2.17 | 8,375 | 1.059.600 | 480280 | 6.63 |
| Pamekasan | 2014 | 2.14 | 8,846 | 1.090.000 | 469081 | 6.55 |
| Pamekasan | 2015 | 4.26 | 9,317 | 1.201.750 | 444281 | 6.54 |
| Sumenep | 2011 | 1.99 | 16,065 | 785.000 | 649017 | 5.68 |
| Sumenep | 2012 | 1.14 | 17,665 | 825.000 | 637160 | 5.35 |
| Sumenep | 2013 | 2.56 | 20,218 | 965.000 | 629431 | 5.43 |
| Sumenep | 2014 | 1.01 | 21,477 | 1.090.000 | 622460 | 5.62 |
| Sumenep | 2015 | 2.07 | 21,751 | 1.253.500 | 593143 | 5.76 |
| Kota Kediri | 2011 | 9.69 | 60,020 | 975.000 | 136781 | 10.39 |
| Kota Kediri | 2012 | 8.12 | 63,185 | 1.037.500 | 141428 | 9.80 |
| Kota Kediri | 2013 | 7.92 | 65,409 | 1.128.400 | 136546 | 10.02 |
| Kota Kediri | 2014 | 7.66 | 69,233 | 1.165.000 | 145426 | 10.16 |
| Kota Kediri | 2015 | 8.46 | 72,946 | 1.339.750 | 142628 | 10.25 |
| Kota Blitar | 2011 | 5.24 | 3,038 | 737.000 | 66200 | 9.88 |
| Kota Blitar | 2012 | 3.68 | 3,237 | 975.000 | 66293 | 9.37 |
| Kota Blitar | 2013 | 6.17 | 3,447 | 924.800 | 68609 | 9.87 |
| Kota Blitar | 2014 | 5.71 | 3,650 | 1.000.000 | 69365 | 9.97 |
| Kota Blitar | 2015 | 3.80 | 3,857 | 1.243.200 | 75516 | 10.08 |
| Kota Malang | 2011 | 9.74 | 33,274 | 1.079.887 | 446337 | 11.12 |
| Kota Malang | 2012 | 7.96 | 35,356 | 1.132.254 | 419899 | 10.60 |
| Kota Malang | 2013 | 7.73 | 37,548 | 1.340.300 | 435058 | 10.27 |

| | | | | | | |
|------------------|------|-------|---------|-----------|---------|-------|
| Kota Malang | 2014 | 7.22 | 39,724 | 1.587.000 | 423631 | 10.81 |
| Kota Malang | 2015 | 7.28 | 41,952 | 1.882.250 | 406935 | 10.55 |
| Kota Probolinggo | 2011 | 5.46 | 5,214 | 810.500 | 104793 | 8.64 |
| Kota Probolinggo | 2012 | 5.26 | 5,552 | 885.000 | 112074 | 8.67 |
| Kota Probolinggo | 2013 | 4.48 | 5,911 | 1.103.200 | 106309 | 8.79 |
| Kota Probolinggo | 2014 | 5.16 | 6,262 | 1.250.000 | 113522 | 8.24 |
| Kota Probolinggo | 2015 | 4.01 | 6,629 | 1.437.500 | 109336 | 8.80 |
| Kota Pasuruan | 2011 | 6.22 | 3,811 | 926.000 | 92091 | 9.05 |
| Kota Pasuruan | 2012 | 4.54 | 4,051 | 975.000 | 95643 | 9.05 |
| Kota Pasuruan | 2013 | 5.41 | 4,315 | 1.195.800 | 98160 | 8.89 |
| Kota Pasuruan | 2014 | 6.09 | 4,561 | 1.360.000 | 97127 | 8.68 |
| Kota Pasuruan | 2015 | 5.57 | 4,813 | 1.575.000 | 97493 | 9.15 |
| Kota Mojokerto | 2011 | 10.59 | 3,166 | 835.000 | 63863 | 10.05 |
| Kota Mojokerto | 2012 | 7.52 | 3,358 | 875.000 | 66399 | 10.11 |
| Kota Mojokerto | 2013 | 5.73 | 3,567 | 1.040.000 | 65898 | 9.94 |
| Kota Mojokerto | 2014 | 4.42 | 3,775 | 1.250.000 | 64630 | 10.06 |
| Kota Mojokerto | 2015 | 4.88 | 3,991 | 1.437.500 | 67079 | 10.10 |
| Kota Madiun | 2011 | 10.62 | 6,494 | 745.000 | 89392 | 10.54 |
| Kota Madiun | 2012 | 6.89 | 6,938 | 812.500 | 84693 | 10.24 |
| Kota Madiun | 2013 | 6.57 | 7,471 | 953.000 | 90103 | 10.94 |
| Kota Madiun | 2014 | 6.93 | 7,966 | 1.066.000 | 86618 | 10.66 |
| Kota Madiun | 2015 | 5.10 | 8,455 | 1.250.000 | 90721 | 11.22 |
| Kota Surabaya | 2011 | 7.81 | 247,687 | 1.115.000 | 1334419 | 10.02 |
| Kota Surabaya | 2012 | 5.27 | 265,892 | 1.257.000 | 1437448 | 9.96 |
| Kota Surabaya | 2013 | 5.32 | 286,051 | 1.740.000 | 1483343 | 9.94 |
| Kota Surabaya | 2014 | 5.82 | 305,957 | 2.200.000 | 1465502 | 10.08 |
| Kota Surabaya | 2015 | 7.01 | 324,228 | 2.710.000 | 1468094 | 10.54 |

| | | | | | | |
|-----------|------|------|-------|-----------|--------|------|
| Kota Batu | 2011 | 4.82 | 6,968 | 1.050.000 | 106550 | 8.59 |
| Kota Batu | 2012 | 3.51 | 7,474 | 1.100.215 | 104012 | 8.32 |
| Kota Batu | 2013 | 2.30 | 8,019 | 1.268.000 | 105445 | 8.76 |
| Kota Batu | 2014 | 2.43 | 8,572 | 1.580.037 | 106777 | 8.66 |
| Kota Batu | 2015 | 4.29 | 9,146 | 1.877.000 | 105496 | 8.94 |



LAMPIRAN B. HASIL UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F | 5.041307 | (37,148) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 154.946788 | 37 | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TPT

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/18 Time: 19:36

Sample: 2011 2015

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | -0.949447 | 0.820381 | -1.157325 | 0.2486 |
| PDRB | 3.31E-06 | 3.88E-06 | 0.853872 | 0.3943 |
| UPAH | -6.40E-07 | 3.24E-07 | -1.974739 | 0.0498 |
| AK | 3.77E-07 | 5.42E-07 | 0.696797 | 0.4868 |
| PD | 0.768055 | 0.091140 | 8.427220 | 0.0000 |
| R-squared | 0.386055 | Mean dependent var | | 4.521211 |
| Adjusted R-squared | 0.372781 | S.D. dependent var | | 1.887689 |
| S.E. of regression | 1.494997 | Akaike info criterion | | 3.668088 |
| Sum squared resid | 413.4777 | Schwarz criterion | | 3.753536 |
| Log likelihood | -343.4684 | Hannan-Quinn criter. | | 3.702702 |
| F-statistic | 29.08249 | Durbin-Watson stat | | 1.028041 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

LAMPIRAN C. HASIL UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 13.029167 | 4 | 0.0111 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|-----------|-----------|------------|--------|
| PDRB | 0.000035 | 0.000007 | 0.000000 | 0.2119 |
| UPAH | -0.000001 | -0.000001 | 0.000000 | 0.7785 |
| AK | -0.000015 | -0.000000 | 0.000000 | 0.0020 |
| PD | 0.339852 | 0.704470 | 0.193225 | 0.4068 |

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TPT

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/18 Time: 19:38

Sample: 2011 2015

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 10.16394 | 4.056292 | 2.505722 | 0.0133 |
| PDRB | 3.55E-05 | 2.33E-05 | 1.523183 | 0.1298 |
| UPAH | -1.07E-06 | 4.33E-07 | -2.478378 | 0.0143 |
| AK | -1.53E-05 | 5.02E-06 | -3.056586 | 0.0027 |
| PD | 0.339852 | 0.462214 | 0.735271 | 0.4633 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.728382 | Mean dependent var | 4.521211 |
| Adjusted R-squared | 0.653137 | S.D. dependent var | 1.887689 |
| S.E. of regression | 1.111756 | Akaike info criterion | 3.242052 |
| Sum squared resid | 182.9283 | Schwarz criterion | 3.959816 |
| Log likelihood | -265.9950 | Hannan-Quinn criter. | 3.532808 |
| F-statistic | 9.680081 | Durbin-Watson stat | 2.184051 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

LAMPIRAN D. HASIL ANALISIS *FIXED EFFECT*

Dependent Variable: TPT
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/24/18 Time: 19:39
 Sample: 2011 2015
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

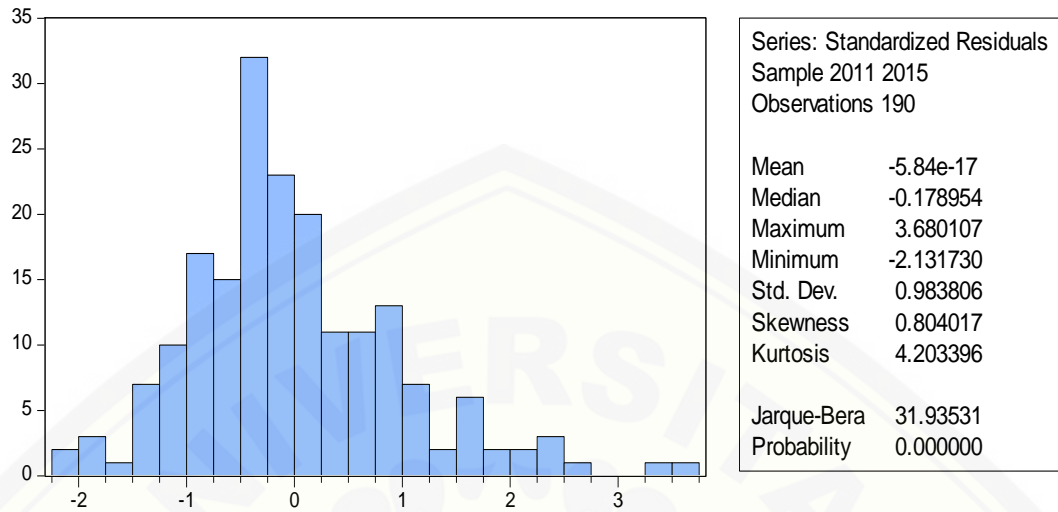
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 10.16394 | 4.056292 | 2.505722 | 0.0133 |
| PDRB | 3.55E-05 | 2.33E-05 | 1.523183 | 0.1298 |
| UPAH | -1.07E-06 | 4.33E-07 | -2.478378 | 0.0143 |
| AK | -1.53E-05 | 5.02E-06 | -3.056586 | 0.0027 |
| PD | 0.339852 | 0.462214 | 0.735271 | 0.4633 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.728382 | Mean dependent var | 4.521211 |
| Adjusted R-squared | 0.653137 | S.D. dependent var | 1.887689 |
| S.E. of regression | 1.111756 | Akaike info criterion | 3.242052 |
| Sum squared resid | 182.9283 | Schwarz criterion | 3.959816 |
| Log likelihood | -265.9950 | Hannan-Quinn criter. | 3.532808 |
| F-statistic | 9.680081 | Durbin-Watson stat | 2.184051 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

LAMPIRAN E. HASIL UJI NORMALITAS



LAMPIRAN F. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

| | PDRB | UPAH | AK | PD |
|------|----------|----------|-----------|-----------|
| PDRB | 1.000000 | 0.523102 | 0.653917 | 0.326631 |
| UPAH | 0.523102 | 1.000000 | 0.347844 | 0.305669 |
| AK | 0.653917 | 0.347844 | 1.000000 | -0.185545 |
| PD | 0.326631 | 0.305669 | -0.185545 | 1.000000 |



LAMPIRAN G. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dependent Variable: REABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/07/18 Time: 00:08
 Sample: 2011 2015
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (unbalanced) observations: 187

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | 1.585407 | 0.517406 | 3.064144 | 0.0025 |
| Y | 2.76E-06 | 2.40E-06 | 1.150841 | 0.2513 |
| W | -3.96E-07 | 2.45E-07 | -1.617518 | 0.1075 |
| JP | -4.30E-07 | 2.27E-07 | -1.891790 | 0.0601 |
| PD | 0.047882 | 0.059878 | 0.799668 | 0.4249 |
| R-squared | 0.036027 | Mean dependent var | | 1.161974 |
| Adjusted R-squared | 0.014841 | S.D. dependent var | | 0.930279 |
| S.E. of regression | 0.923350 | Akaike info criterion | | 2.704758 |
| Sum squared resid | 155.1688 | Schwarz criterion | | 2.791151 |
| Log likelihood | -247.8949 | Hannan-Quinn criter. | | 2.739765 |
| F-statistic | 1.700496 | Durbin-Watson stat | | 1.436203 |
| Prob(F-statistic) | 0.151771 | | | |